

**“ PENGARUH PENERAPAN *WISTHLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNANCE,*
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK”**

(Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Novita Ayu Fibriyanti

1705046018

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Novita Ayu Fibriyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Novita Ayu Fibriyanti

NIM : 1705046018

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi :PENGARUH PENERAPAN *WISTHLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNANCE*, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ari Kristin P.,SE.,M.Si.

NIP.19790512 200604 1 004



Arif Afendi,SE.,M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Novita Ayu Fibriyanti

NIM : 1705046018

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)*

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, baik, cukup baik, pada tanggal **26 April 2021**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021.

Semarang, 26 April 2021

Mengetahui

Ketua Sidang

Drs. H. Wahab, MM

NIP. 196909082000031001

Penguji Utama I

Setyo Budi Hartono, S.A.B.M.

NIP. 198511062015031007

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.

NIP. 19790512 200604 1 004

Sekretaris Sidang

Arif Efendi, SE., M.Sc

NIP. 19670119 1998031002

Penguji Utama II

Choirul Huda, M.Ag

NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Arif Efendi, SE., M.Sc

NIP. 19670119 1998031002



MOTTO



Artinya : Wahai Orang –orang yang beriman ! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan Negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung

(Q.S Ali Imran:200)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Nurrulloh Kholiq dan Ibu Nur Hidayah Syafaati yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moril , materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak anaknya.
2. Saudara laki - lakiku, Yoga Anjasmara Dwi Saputra yang aku sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk keluarga besar Sanus Family Zulvia Rahmawati, Isnaini Hidayatun Muharromah, Roundhotu Jannati, Candra Hendrawan, Choirul Hasri, M. Lizamuddin, dan Ana Nur Wahidah yang sudah menjadi sahabat serta keluarga yang selalu mendoakan,memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Sahabat- sahabatku Sifa Izzatin Ni'mah, Atik Ika Irmawati, Siti Ria Veny Y.S, Elsa Islamiati, Isnaini Nur Khabibah, Nafkhotul Islahiyyah, Nur Imamah, Tri Lestari,Supriyana, Akromakum Munan, Safira Nuraini ,Emil Dei Rahim yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi khususnya angkatan 2017 “GANDEWA” terimakasih atas kebersamaannya serta ilmu yang tidak di dapat di perkuliahan selama ini. Semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi.
6. Untuk Kelurga besar DEMA FEBI dan TAX CENTER terimakasih sudah membersamai serta memberi semangat dalam berproses.
7. Untuk Keluarga besar KKN RDR 75 kelompok 14 Lilik Parwanti, Ali Ahmadi, Lutfi, Dewi,Abid,Siti,Reza, Bondan, Akhyar, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Untuk teman – teman seangkatan 2017 khususnya AKS.A yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 April 2021
Deklarator



Novita Ayu Fibriyanti
NIM. 1705046018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَي = ay

اَو = aw

D. Syaddah(-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang(...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak relative masih rendah sehingga Instansi KPP Pratama di harapkan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upayanya yaitu dengan adanya Pengawasan terhadap kecurangan yang terjadi di lingkungan DJP serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang lebih di tekankan dengan pengenaan sanksi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak. Objek penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif..Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linier berganda dengan program SPSS. Metode sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Jumlah responden yang di jadikan sampel yaitu sebanyak 100 sampel responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Whistleblowing System* dan Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel *Good Governance* dan variabel Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci ; **WPOP, Kepatuhan, *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak.**

ABSTRACT

The level of taxpayer compliance is still relatively low so that the KPP Pratama Agency is expected to continue to improve taxpayer compliance. One of the efforts is to supervise fraud that occurs in the DGT environment and to raise awareness of taxpayers by holding tax socialization activities which are more emphasized by the imposition of tax sanctions.

This study aims to test whether there is an effect of the application of the Whistleblowing System, Good Governance, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. The object of this research is individual taxpayers at KPP Pratama Pati.

This type of research is quantitative research .. In data collection using a questionnaire. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the SPSS program. The sample method used is random sampling. The number of respondents in the sample is 100 samples of individual taxpayers at KPP Pratama Pati.

The results showed that the Whistleblowing System variable and the Tax Sanctions variable had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the variable of Good Governance and the variable of taxpayer awareness had no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords ; WPOP, Compliance, Whistleblowing System, Good Governance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN *WISTHLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNANCE, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK* (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)” .Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P.,SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Afendi,SE.,M.Sc selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Nurulloh Kholiq dan Ibu Nur Hidayah Syafaati yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.

7. KPP Pratama Pati Yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabati semua serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 April 2021

Penulis



Novita Ayu Fibriyanti

NIM. 1705046018

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1. Bagi Akademis	7
2. Bagi Penulis.....	7
3. Bagi Pembaca.....	7
4. Bagi Universitas	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.2 Pajak Dalam Islam.....	10
2.1.3 <i>Whistleblowing System</i>	13
2.1.4. <i>Good Governance</i>	14
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	16

2.1.6 Sanksi Pajak.....	18
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Sumber Penelitian	28
a. Data primer	28
b. Data Sekunder.....	28
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Variabel Penelitian	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	31
3.6.2 Uji Instrumen Penelitian.....	31
3.7 Uji Asumsi Klasik :	32
3.7.1 Uji Normalitas	32
3.7.2 Uji Multikolonieritas	33
3.7.3 Uji Heterokedastisitas.....	33
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.8.1 Uji Signifikansi Parsial (T- test).....	33
3.8.2 Uji Signifikansi Simulan (F- test).....	34
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	34
3.9 Definisi Operasional.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pati.....	38
4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Pati	39
4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Pati.....	40
4.1.4 Kode Etik KPP Pratama Pati	40
4.2 Pengujian dan Hasil Analisa Data.....	41
4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian	41
4.3 Teknik Analisis Data.....	43

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.3.2 Uji Validitas.....	45
4.3.3 Uji Reabilitas	48
4.4 Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1 Uji Normalitas	49
4.4.2 Uji Multikolinieritas	52
4.4.3 Uji Heterokedasitas.....	52
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.5.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)	56
4.5.3 Uji F (Simultan).....	58
4.6 Pembahasan dan Analisis Data	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 KESIMPULAN	63
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN.....	64
5.3 SARAN- SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pati	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3 Definisi Operasional	35
Tabel 4 Distribusi Sampel.....	41
Tabel 5 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 6 Klasifikasi Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 7 Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 8 Uji Statistik Deskriptif	44
Tabel 9 Uji Validitas	46
Tabel 10 Uji Reabilitas.....	48
Tabel 11 Uji Normalitas One- Sample K-S	51
Tabel 12 Uji Multikolonieritas.....	52
Tabel 13 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Glejser</i>	53
Tabel 14 Uji Analisis Regresi Linier	54
Tabel 15 Uji Determinasi Koefisien R ²	56
Tabel 16 Uji Signifikan T	57
Tabel 17 Hasil Uji F (Simultan).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2 Histogram Uji Normalitas	49
Gambar 3 Uji normalitas P_Plot.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1.Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	68
2. Lampiran 2 Tabulasi Data.....	75
3. Lampiran 3 Hasil Output _ SPSS Uji Statistik Deskriptif	86
4. Lampiran 4 Hasil Output – SPSS Uji Validitas	86
5. Lampiran 5 Hasil Output – SPSS Uji Reabilitas	93
6. Lampiran 6 Hasil Output – SPSS Uji Normalitas One – Sample KS	95
7. Lampiran 7 Hasil Output – SPSS Normal P-Plot	96
8. Lampiran 8 Hasil Output - SPSS Normal Grafik Histogram.....	97
9. Lampiran 9 Hasil Output – SPSS Uji Multikolonieritas.....	97
10. Lampiran 10 Hasil Output – SPSS Uji Heteroskedastisitaas Scatterplot	98
11. Lampiran 11 Hasil Output – SPSS Uji Heteroskedastisitas Glejser	98
12. Lampiran 12 Hasil Output – SPSS Uji Analisis Regresi	99
13. Lampiran 13 Hasil Output – SPSS Uji T	100
14. Lampiran 14 Surat Izin Riset	101
15. Lampiran 15 Dokumentasi.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan makmur serta menjamin warga Negara untuk memperoleh status hukum yang setara. Berbagai pembangunan nasional yang membutuhkan pendanaan telah dilakukan dan ditingkatkan, terutama yang bersumber dari perpajakan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang di maksud dengan pajak merupakan kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berguna untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. (pasal 1 ayat (1))¹.

Sedangkan pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan sumbangan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan wajib kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang, yang tidak langsung dikompensasikan, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Perpajakan merupakan pajak dalam negeri yang paling aman karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara dan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mengatur perekonomian. Di bandingkan dengan pajak nasional bukan pajak (PNBP), perpajakan lebih dipengaruhi oleh statusnya. , Termasuk keluarnya kebijakan perpajakan baru. Tujuan utama dari kebijakan pemerintah yang baru adalah membantu meningkatkan penerimaan pajak

Penerimaan pajak sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib Pajak, Kepatuhan merupakan suatu motivasi seseorang, kelompok, maupun organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku yaitu Undang - Undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini yaitu wajib pajak patuh terhadap adanya peraturan atau Undang -Undang Perpajakan yang di berlakukan.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Perpajakan.

¹ UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive telah memenuhi ketentuan material perpajakannya.

Kepatuhan formal wajib pajak pada 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jumlah wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan SPT sebanyak 13,37 juta. Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9 % dari total WP yang wajib SPT sebanyak 18,33 juta. Data ini berada di bawah target 80% . Jika di perinci realisasi kepatuhan formal wajib pajak badan hanya mencapai 65,28 % . Sementara , kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan non karyawan masing - masing sebesar 73,2% dan 75,31%.²

Tabel 1 Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pati

Tahun	WPOP Terdaftar	WP Lapor SPT	WP Tidak Lapor SPT
2015	118.089	1.179	116.910
2016	129.228	59.947	69.281
2017	144.976	56.284	88.692
2018	160.048	28.946	131.102
2019	194.982	67.390	127.592

Sumber : KPP Pratama Pati, Di Kembangkan Dalam Penelitian Ini

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2015 – 2019 di KPP Pratama Pati. Pada tahun 2015 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pati sebesar 118.089 namun yang Lapor SPT hanya 1.179 .Kemudian pada tahun 2016 WP yang lapor SPT mengalami kenaikan yaitu sebanyak 59.947, pada tahun 2017 penyampaian SPT sebanyak 56.284 dari WPOP yang terdaftar sebanyak 144.976. kemudian pada tahun 2018 sebanyak 28.946 WP yang lapor SPT dari 160.048 WPOP yang terdaftar dan pada tahun 2019 WP yang yang lapor SPT sebesar 67.390 dari 194.982 WPOP yang terdaftar. Dari tabel data di atas dapat di lihat bahwa kepatuhan wajib pajak oraang pribadi yang ada di KPP Pratama Pati masih kurang di karenakan perbandingan antara jumlah WPOP yang terdaftar dengan WP yang Lapor SPT masih banyak yang belom menyampaikan SPT Tahunanya.

²News.ddtc.co.id di unduh pada 22 April 2020

Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, *Good Governance*, *Whistleblowing System* (Pengawasan), sanksi pajak serta lingkungan wajib pajak berada.

Transparansi sangat di perlukan dalam hal keuangan, seperti halnya didalam sektor perpajakan. Salah satu upaya untuk untuk mendorong tingkat transparansi maka perlu diadakannya pengawasan yang baik, yaitu dengan penerapan *Whistle blowing System* yang telah di terapkan pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2011 yang berisi kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP). DJP telah berkomitmen dalam mendukung segala bentuk upaya dalam menjaga integritas dan profesionalisme pegawai dalam bekerja. Sehingga DJP mengajak seluruh wajib pajak berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pegawai. Tujuan di adanya penerapan *Whistleblowing System* ini yaitu sebagai pengingat bagi seluruh pegawai kementerian keuangan agar tatap fokus dalam melaksanakan pekerjaan, teguh menjaga integritas, serta bekerja secara optimal untuk mencapai target penerimaan pajak. Laporan pelanggaran dapat di akses melalui: Wise.Kemenkeu.go.id, telepon (021) 1500200, Website : Pengaduan.Pajak.go.id, Email : Pengduan @pajak.go.id Chat : WWW.Pajak.go.id.

Reformasi birokrasi perpajakan merupakan reformasi yang komprehensif dengan melaksanakan dan menerapkan *Good Governance*. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan *Good Governance*, yaitu: “Pemerintahan yang mengembangkan dan melaksanakan asas profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua orang”. Prinsip prinsip utama Good goverannance yaitu : 1. *Transparency* merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam hal informasi, 2. *Accountability* (mempertanggung jawabkan) merupakan suatu struktur, fungsi, sistem dan tanggung jawab yang jelas dalam sebuah orgaanisasi yang efektif, 3. *Responsibility* merupakan konsistensi antara manajemen organisasi dan prinsip prinsip serta hukum yang berlaku dari orgnisasi yang sehat, 4. *Independency* merupakan keadaan organisasi yang di kelola secara professional tanpa benturan kepentingan, 5. *Fairness* merupakan perlakuan yang adil untuk mewujudkan hak hak pemangku kepentingan sesuai hukum yng berlaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau memahami masalah perpajakan. Kesadaran di sini di jelaskan bahwa wajib pajak memeberi kontribusi dana secara sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penilaian positif wajib pajak atas penyelenggaraan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan

masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan suatu hukuman bagi seseorang yang melanggar peraturan . sedangkan sanksi di sini di kaitkannya dengan pelaporan SPT dimana sanksi akan di berikan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Sanksi Pajak bertujuan agar penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik , maka perlu ada proses penegakkan hukum di bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan *self assessment system*, karena hal tersebut sesuai dengan isi dari pengertian pajak sebagai iuran wajib yang di paksakan sesuai dengan Undang – Undang, penegakkan hukum berarti memberikan segala sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang di lakukan dalam melaksanakan perpajakan.

Dengan adanya penerapan *Whistleblowing System* (Pengawasan) yang baik maka akan menciptakan pengelolaan kinerja di lingkungan DJP maupun di lingkungan KPP yang sesuai dengan Prinsip prinsip *Good Governance* di antaranya yaitu terwujudnya transparansi yang kemudian akan menjadikan wajib pajak sadar untuk mengetahui, mengerti perihal pentingnya membayar pajak secara tepat waktu yang memiliki tujuan untuk pembangunan Negara. Dan kemudian kesadaran tersebut dapat meningkat dengan adanya sanksi pajak yang telah di terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak dn sanksi pajak adalah :

Pada varibael pertama Penelitian yang di lakukan oleh Naili (2017) menyatakan bahwa penerapan *whistle blowingsystem* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Grobogan.³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo (2015) penerapan *whistle blowing system* di lingkungan DJP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Bekasi ⁴. Maka dari itu penerapan *Whistleblowing System* tetap harus di laksanakan secara konsisten di lingkungan DJP .

³Naili Ulfatus Syariah,”*Pengaruh Penerapan Whistle Blowing System, Sosialisasi Perpajakan, kesadaran wajib Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Grobogan)*”, Skripsi (IAIN Surakarta) 2017.

⁴Whereson Siringoringo,”*Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang di Kota Bekasi)*”. Jurnal AkuntansiVolume I, NO.02, Mei 2015:207-224.

Untuk variabel kedua Penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bekasi di karenakan belum di terapkannya *Good Governance* secara maksimal. Sedangkan menurut penelitian Sulistyowati, Pahlevi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *Good Governance* dengan kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sleman⁵. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance* dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cakung Dua.

Untuk variabel ketiga Penelitian yang di lakukan oleh Nailil (2017) dan Mutia (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga pendapatan Negara yang bersumber dari pajak akan meningkat⁶ Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh Sukma (2017) Menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan rendahnya kesadaran hukum wajib pajak akan hukum perpajakan maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak⁷.

Untuk variabel ke empat Penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo (2015) menyatakan bahwa resiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi , memperkuat pengaruh *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak dan resiko sanksi pajak sebagai variable moderasi, juga memperkuat pengaruh *Whistle Blowing System*. Sedangkan, menurut penelitian Sulistyowati, Pahlevi (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan di lanjut dengan penelitian Luh Putu Gita Cahyani (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak , sehingga semakin ketat dan berat penerapan sanksi yang di berikan maka kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya akan meningkat.

Karena terjadi ketidak konsistenan antara penelitian terdahulu maka saya melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengamati Kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat dari

⁵Pahlevi ,Reza Idhar & Syska Lady Sulistyowatie . *Penerapan Good Governance, Whistleblowing System Dan Resiko sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Di Kabupaten Sleman*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia,3 2018.

⁶ Mutia Tri Febriani, “ *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*”, 2016.

⁷Nada Melati Sukma,” *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderisasi oleh Pelaksanaan Good Government Governance*”. 2017

beberapa faktor yaitu Penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.

Dengan adanya latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang : “ **Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* , *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” (**Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati**)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan *WhistleBlowing System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ?
2. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ?
3. Apakah kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan *WhistleBlowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yng terdaftar di KPP Pratama Pati.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pibdi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dan di harapkan penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan pengalaman dengan praktik di lapangan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai adanya penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance* ,Kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.

4. Bagi Universitas

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi Mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Tiap – tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnnya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah pnelitian. Pembahasan penelitian meliputi, Penerapan *whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran wajib Pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, rumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran yang di gunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel dan pengukuran, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil – hasil penelitian, seluruh proses dan teknik analisis data sampai dengan hasil pembahasan dan pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang telah digunakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, dijelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk penelitian – penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behaviour* (TPB)

Theory Of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan beberapa informasi yang tersedia. Dalam teori ini Azjen menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang ada pada diri orang tersebut⁸. *Theory Of Planned Behaviour* merupakan penyempurnaan dari teori terdahulu yakni *Theory Reasend Action* (TRA). *Theory Reasend Action* (TRA) menyatakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude toward behaviour*) dan perilaku yang berhubungan dengan norma subjektif (*subjective norms*) namun Ajzen berpendapat bahwa *Theory Reasend Action* (TRA) belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Sehingga Ajzen menambah satu faktor dalam *Theory Of Planned Behaviour* berupa kontrol perilaku yang di persepsikan.

Theory Of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa tindakan manusia di arahkan oleh tiga jenis keyakinan yaitu⁹:

1. Keyakinan perilaku (*behavioural beliefs*) adalah suatu keyakinan tentang kemungkinan akan terjadi sebuah perilaku dalam TRA dikaitkan dengan sikap (*attitude*).
2. Keyakinan normatif (*normative control*), adalah suatu keyakinan mengenai harapan – harapan normative yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan – harapan tersebut dalam TRA dikaitkan dengan norma subjective (*subjective norm*).
3. Keyakinan kontrol (*control beliefs*) adalah suatu kepercayaan mengenai keberadaan faktor- faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku. Faktor tersebut dalam TRA belum ada yang kemudian dalam

⁸Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandhika Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, “*Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” . Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE, UN GRI Kediri, Vol.4. 1 , hal 20 -21.

⁹ Rachmawati Meita Oktaviani, “ *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory*” . Jurnal Binis dan Ekonomi, Vol.22. 1, hal.85-95

TPB di kembangkan yang kemudian di sebut dengan kontrol berperilaku yang di persepsikan (*perceived behavioral control*).

2.1.2 Pajak Dalam Islam

Pajak dalam istilah bahasa arab di kenal dengan *Al-Usyr* atau *Al-maks* atau disebut *Adh- Dhariibah* yang memiliki arti suatu pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para penarik Pajak. *Dhariibah* merupakan suatu kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat. Pajak (*Dhariibah*) dalam islam merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang telaah di sepakati dan di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ulama. Pajak (*Dhariibah*) merupakan suatu kewajiban lain atas harta , yang datang hanya pada saat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal berdasarkan keputusan Uli Amri .¹⁰

Dhariibah merupakan kewajiban umat Islam yang bertujuan untuk membayar pengeluaran umat Islam secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, karena tanpa pengeluaran ini akan terjadi bencana yang lebih besar. Objek *dharriibah* adalah pendapatan atau harta setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti zakat. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan zakat, maka dalam perhitungannya, zakat yang telah dikeluarkan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) yang terutang dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi maupun Badan.

Pajak dalam Islam diperlakukan secara adil dan selaras berdasarkan semangat nilai-nilai Islam dan digunakan untuk kebaikan (masalah) yang lebih besar, Oleh karena itu sistem yang adil harus memenuhi kriteria sebagai berikut :¹¹

- a. Jenis Pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan dan mewujudkan manfaat maqashid.
- b. Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak terlalu memberatkan.
- c. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak

¹⁰ WWW. Pajak. Go .Id.

¹¹ Havis Aravik ,*Sejarah Perekonian Ekonomi Islam Kontemporer* , Depok: Kencana , 2017,h.97

Beberapa istilah – istilah yang hampir sama dengan *adh – Dharibah* atau pajak antara lain yaitu :

- a. *al- jizyah* (Upeti yang wajib di bayar oleh ahli kitab untuk pemerintah islam)
- b. *al- Kharaj* (Pajak tanah dimiliki oleh Negara Islam)
- c. *al- 'Ushr* (Bea Cukai dibayar oleh pedagang non-Muslim yang telah memasuki Negara Islam)

Gusfahmi menyimpulkan tentang beberapa ketentuan Pajak (*Dharibah*) menurut islam, perbedaan pajak dengan sistem non- islam adalah : ¹²

1. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara dan terputus-putus, dan dapat dipungut bila Baitul Mal tidak memiliki harta atau kekurangan harta. Namun, jika pusat perbelanjaan baitul diisi ulang, pajak tersebut dapat dihapuskan.
2. Pajak (*dharibah*) Ini adalah kewajiban umat Islam untuk menghimpun dana untuk penggalangan dana, sebatas dana yang harus digunakan untuk penggalangan dana, tidak lebih.
3. Pajak (*dharibah*) yang dikumpulkan berasal dari muslim tidak boleh datang dari non muslim. Karena pajak (*dharibah*) dikumpulkan bertujuan untuk membayar kewajiban umat Islam, bukan kewajiban non muslim.
4. Pajak (*dharibah*), hanya diberlakukan bagi muslim kaya, bukan orang lain. Orang kaya yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya untuk dirinya maupun keluarganya.
5. Pajak (*dharibah*), berdasarkan jumlah dana yang terkumpul, bukan lebih.
6. Ketika pajak (*dharibah*) tidak lagi dibutuhkan, mereka bisa bebas pajak.

¹² Fadhilah, " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur",2018

Dalam Al- Quran (Bahasa Arab) kata “pajak” terdapat pada Q.S Al- Taubah (9) : 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan di hari berikutnya, mereka yang tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak percaya pada agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberi Kitab, sampai mereka dengan taat membayar *jizyah* (pajak) selama mereka dalam keadaan patuh.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa *jizyah* atau pajak perlindungan hanya dikenakan kepada non muslim yang mampu dan mendapat perlindungan di negara muslim. Sedangkan bagi non muslim yang tidak mampu tidak dibebani bahkan dibebaskan. Beban tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan status sosial mereka.

Agama Islam mewajibkan ummatnya untuk menggunakan harta dan jiwa yang dimiliki dalam hal kebaikan. Allah Berfirman dalam Q.s At- Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban umat muslim dalam menggunakan harta secara baik dan benar . Kaum muslimin atau pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan bagian untuk setiap orang yang bisa mempergunakan hartanya dengan kebaikan.

¹³ Q.S. At- Taubah (9): 29

¹⁴ Q.S At Taubah : 41

Memungut pajak memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan umat, sehingga para ahli memperbolehkan memungut pajak (selama tidak merugikan masyarakat).¹⁵

2.1.3 *Whistleblowing System*

Whistleblowing System merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan (pengawasan) yang berguna untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam suatu perusahaan. Orang yang melaporkan pelanggaran disebut (*Whistleblower*). *Whistleblower* adalah karyawan / komunitas yang melaporkan suatu kejadian penipuan yang terjadi di lingkungan perusahaan atau pemerintahan, laporan tersebut dapat disampaikan langsung oleh pihak internal maupun eksternal yang mengetahui terjadinya kecurangan.¹⁶

Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-22 /PJ/ 2011, *Whistleblowing System* pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pengaduan antara lain: pelayanan yang kurang memadai, fasilitas kantor yang terbatas, kode etik dan disiplin bagi PNS, serta tindak pidana perpajakan. Tujuan penerapan *Whistleblowing System* adalah agar setiap pegawai pajak menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, bekerja sekeras mungkin dengan semangat yang tinggi, dan melaporkan pelanggaran terhadap sesama pejabat pajak lainnya.¹⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerangkan bahwa sistem hukum Penerapan *whistleblowing System* harus terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. *Whistleblower*, merupakan bagian utama dalam penerapan *whistleblowing system*, karena di sinilah titik awal terbukanya pelanggaran yang terjadi .
2. Metode pengaduan, merupakan tempat pelaporan pelanggaran hukum yang disediakan secara komprehensif untuk memudahkan akses secara efektif, serta harus memiliki keamanan yang tinggi agar informasi pelapor dapat terlindungi. Dalam hal ini DJP menerapkan *Whistleblowing System* dan kring pajak 500.200.

¹⁵ Noor Linda Arova, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Pajak Dan Perilaku Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus DiKPP Pratama Demak) “. 2020

¹⁶ Cyntia Ayu Wardani, Sulhani, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing Sytem* Di Indonesia”. Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Vol 9.(1).hal 29-44.

¹⁷ Naili Ulfatus Syariah,” Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System*, Sosialisais Perpajakanm Kesadaran Wajib Pajak dn Lingkungan ajib Pajak berada Terhadap Keptuhn Wajib Pajak Orang pribadi”,Skripsi.(IAIN Surakarta 2017) hal.16-17

3. Untuk menangani pengaduan, KITSDA akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertujuan untuk memproses dan membuktikan pengaduan yang di terima.

4. Jaminan Perlindungan, karena ketika perlindungan tidak mencukupi, pelapor yang memiliki informasi akan sulit mengungkapkannya, sehingga mengancam kenyamanan bahkan nyawa mereka, karena dalam beberapa kasus, pelapor pernah mengalami kesengsaraan, nasib..

Allah Berfirman dalam Q.S Al- maidah ayat 117 yang menjelaskan mengenai pengawasan (*Whistleblowing System*):

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku adalah saksi melawan mereka, selama aku ada di antara mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu (Q.S A- Maidah :117).¹⁸

2.1.4. Good Governance

Good Governance merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan baik, dengan praktik – praktik yang sehat agar terlaksanannya suatu prinsip – prinsip *transparency*, *accountability*, *reponbility*, *independence*, dan *fairness* untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan menurut Bank Dunia, *governance refers to the formation and stewardship of the formal and informal rules that regulate the public realm, the area in which state as well as economic and societal actor interact to make decisions*. Dari pengertian ini , Syakhroza (2005), menjelaskan “*Governance* dari sudut pandang organisasi sebagai “*open system*”.

¹⁸ Rohmah , Noer. *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif al- Quran Dan Hadist*. Malang,2019,h.7.

Oleh karena itu, individu atau kelompok yang terkait dengan suatu kegiatan harus memelihara hubungan mereka melalui kepatuhan terhadap aturan sistem atau lingkungan di mana lembaga bersangkutan berada.¹⁹

Secara Umum terdapat lima prinsip utama *good governance* menurut OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*):²⁰

1. Transparansi (*Transparancy*) merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam hal informasi.
2. Akuntabilitas (*Accountbility*) merupakan suatu fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab yang jelas dalam sebuah organisasi yang efektif.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan konsistensi antara manajemen organisasi dan prinsip-prinsip serta hukum yang berlaku dari organisasi yang sehat.
4. Kemandirian (*Independency*) merupakan suatu keadaan organisasi yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
5. Keadilan (*Fairness*) merupakan perlakuan yang adil dan pusat untuk mewujudkan hak-hak pemangku kepentingan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Good Governance dalam pandangan Islam dijelaskan dalam Q.S Al – Hajj ayat 41, yaitu

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : (Yaitu) orang – orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah – lah kembali segala urusan.

Ayat di atas menjelaskan *Good Governance* dalam pandangan Islam, dimana pembangunan di kelola berdasarkan : 1.Menciptakan suasana kondusif untuk

¹⁹ Robertus M. Bambang Gunawan, “GRG (*Good Governance, Risk Management, And Compliance*) Konsep dan Penerapannya”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016,hal.43

²⁰ Erna Rusvalita, “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lmpung Dengan Implementas Whistleblowing System sebagai Variabel Moderating”,,,,, Tesis, 2017 .

masyarakat 2. Menciptakan kemakmuran ekonomi 3. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan.²¹

Selain ayat di atas Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Good Governance* memiliki prinsip *Accountability* atau pertanggungjawaban yang selalu berkaitan dengan konsep amanah, selain itu terdapat prinsip *Fairness* yang merupakan suatu perlakuan adil.²²

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dan mengerti. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak juga dapat di artikan sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak.²³ Wajib pajak memiliki iktikad untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) , adalah wajib pajak memberi kontribusi dana secara sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Terpenuhinya kewajiban perpajakan yang tepat akan berpengaruh

²¹ Muhhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar : Edukasi Mitra grafika, 2017 h.86

²² Q.S Al- Baqarah 282

²³ Johannes Herbert Tene, Jullie J.Sondakh, Jesy D.I. Warongan, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal EMBA Vol.5 (2) hal 443-453.

terhadap kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memenehui kewajiban perpajakannya secara sadar dan patuh terhadap perpajakan.²⁴

Wajib pajak di katakan memiliki kesadaran apabila :²⁵

- a. Wajib pajak mengetahui Undang – Undang tentang perpajakan dan mengetahui fungsi serta manfaat pajak bagi Negara.
- b. Memahami bahwa kewajiban sebagai seorang wajib pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
- d. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

Allah Berfirman dalam Q.S Al- Maidah Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَرِيءَةٌ أَن تَحْكُمَ
إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Ayat di atas menerangkan agar umat manusia menunaikan kewajiban atas harta yang di miliki. Dan Allah berjanji akan pahala yang besar bagi orang yang menginfakkan hartanya. Maka dari itu masyarakat wajib untuk sadar dalam membayar pajak. Pajak yang di bayarkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

²⁴ Agustina Beti,” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*),kejujuran Wajib pajak (*Tax honesty*), Kemauan Membayar Dari wajib Pajak(*Tax Mindedness*), Kedisiplin Wajib Pajak (*Tax diclipne*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Tax Compliance*).” Dalam Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA0 ISSN : 2337-56xx.Volume :xx, Nomor :xx h.3

²⁵ Dona Fitria, ” *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pmahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jounal Of Applie Bussiniss and Economics. Vol.4(1) hal. 30-44.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman yang di berikan oleh orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan suatu pedoman bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan di lakukan. Sanksi di perlukan agar seseorang tidak melanggar suatu aturan atau Undang – Undang.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 berkaitan dengan sanksi pajak di kenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan SPT, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum perpajakan No.16 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi , paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang – Undang perpajakan ada dua macam jenis sanksi yaitu : Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur adanya sanksi perpajakan yaitu :²⁶

- a. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan sangat berat.
- b. Sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perpajakan sangat ringan.
- c. Penerapan sanksi yang cukup berat sangat bermanfaat untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada pelanggar dan tidak dapat ditoleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat di negoisasikan.

²⁶ Mutia Tri Febriani, " Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melkukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas" ,,,,,Artikel,2016 .

Allah Berfirman dalam Q. S Al- Ashr ayat 3 :

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

Artinya : kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

Berdasarkan Ayat di atas menerangkan bahwa kita di anjurkan untuk saling menasehati. Dalam perpajakan berkaitan dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tertuang dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak merupakan orang perseorangan atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perpajakan.²⁷

Kepatuhan Perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu: Kepatuhan administratif atau kepatuhan normal yaitu kepatuhan terkait dengan ketentuan dan prosedur perpajakan secara umum. Kepatuhan teknis atau kesesuaian material adalah kepatuhan terkait pengisian SPT yang benar dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar.²⁸

Beberapa indikator yang di gunakan untuk mengukur wajib pajak di antaranya yaitu ²⁹:

- a. Benar dalam perhitungan pajak terhutang
- b. Benar dalam pengisian SPT
- c. Tepat waktu dalam melaporkan SPT
- d. Melakukan kewajiban dengan secara sukarela sesuai dengan aturan perpajakan.

²⁷ Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1(1) hal 92 – 116.

²⁸ Rachmawati Meita Oktaviani, "Determinan Keptuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediati Dari Perspektif Planned Behaviour Theory", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.22(1) hal 85-95.

²⁹ Syska Lady Suulistyowati, Reza Widhar Pahlevi, "Penerapan Good Governance, Whistleblowing System dan resiko sanksi pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajk di Kabupaten Sleman", Riset Akuntansi dan keuangan Indonesia ,vol.3 (2) hal 155.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Kesungguhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya tercermin dari pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Allah berfirman dalam Q.S An- Nur Ayat 54 :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَاسُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Katakan, "Taatilah Allah dan taati Nabi; jika kamu berpaling, maka sebenarnya kewajiban Nabi (Muhammad) hanya apa yang dibebankan padanya, dan kewajibanmu hanya apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu mematuhi, niscaya kamu akan mendapat petunjuk, dengan menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia kaum muslim untuk taat kepadaNya dan Rasullullah. Rasulallah mengajarkan kepada semua umat untuk taat dan mematuhi perintah Allah . Umat muslim berkewajiban mematuhi semua aturan dan kebaikan yang akan kembali kepada dirinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran karya-karya sebelumnya terkait penelitian yang dilakukan untuk menghindari duplikasi atau plagiasi dan menjamin keaslian penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Whereson Siringoringo (2015) yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan risiko sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *Whistle Blowing System* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Risiko sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak, risiko sanksi perpajakan sebagai variabel

moderasi, juga memperkuat pengaruh *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰

Pada Tahun (2017) Syska Lady Sulistyowati dan Reza Widhar Pahlevi melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Governance* Dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai moderasi, yang menyimpulkan bahwa Penerapan *Good Governance* dan *WhistleBlowing Sytem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berpengaruh negatif antara penerapan *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak jika di moderasi oleh variabel risiko sanksi pajak, sedangkan penerapan *Whistleblowing Sytem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak jika di moderasi oleh variabel risiko sanksi pajak.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Indar Khaerunnisa dan Adi Wiratno (2014), yaitu tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Moralitas Pajak Budaya Pajak dan *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³²

Penelitian lain dilakukan oleh Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum (2019) tentang Kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan,. Namun secara parsial hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³³

Penelitian lain dari I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati (2016), yang bertujuan untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan

³⁰Whereson Siringoringo, “Jurnal Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi) ”, Jurnal Akuntansi Vol.XIX(02) hal 207.

³¹ Syska Lady Sulistyowati, Reza Widhar Pahlevi, “Penerapan *Good Governance*, *Whistleblowing System* dan risiko sanksi pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman”, Riset Akuntansi dan keuangan Indonesia ,vol.3 (2) hal 155.

³² Indar Khaerunnisa, adi Wiratno, “ Pengaruh Moralitas pajak, Budaya Pajak, dan *Good Governance* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal riset Akuntansi Dan Perpajakan Vol.1 no.2 hal.211-224.

³³ Aryo prakoso, Galih Wicksono, Sugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, “ Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntansi &Ekonomi FE,UN PGRI Kediri Vol.4 No.1

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Denpasar. Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Denpasar.³⁴

Penelitian yang di lakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) yaitu tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa tariff pajak, pemahaman Perpajakan dan Sanksi pajak Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara stimultan maupun pasial.³⁵

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Whereson Siringoringo	Jurnal Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi)	<i>Good Governace, Whistl eblowing System</i> , Resiko Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Kuantitatif Kausalitas	Penerapan <i>Good Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, risiko sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, memperkuat pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kepatuhan wajib pajak, risiko sanksi perpajakan sebagai variabel modifikasi, juga

³⁴ IMade Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati, “ Pengaruh Kesadaran, SOSialisasi , Akntbilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpjaakan Pda Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermontor”, E- Jurnal Akuntansi Uneversits Udayana, Vol 16.3

³⁵ Luh Putu Gita Cahyani , Naniek Noviari, “*Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26.3 .

memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

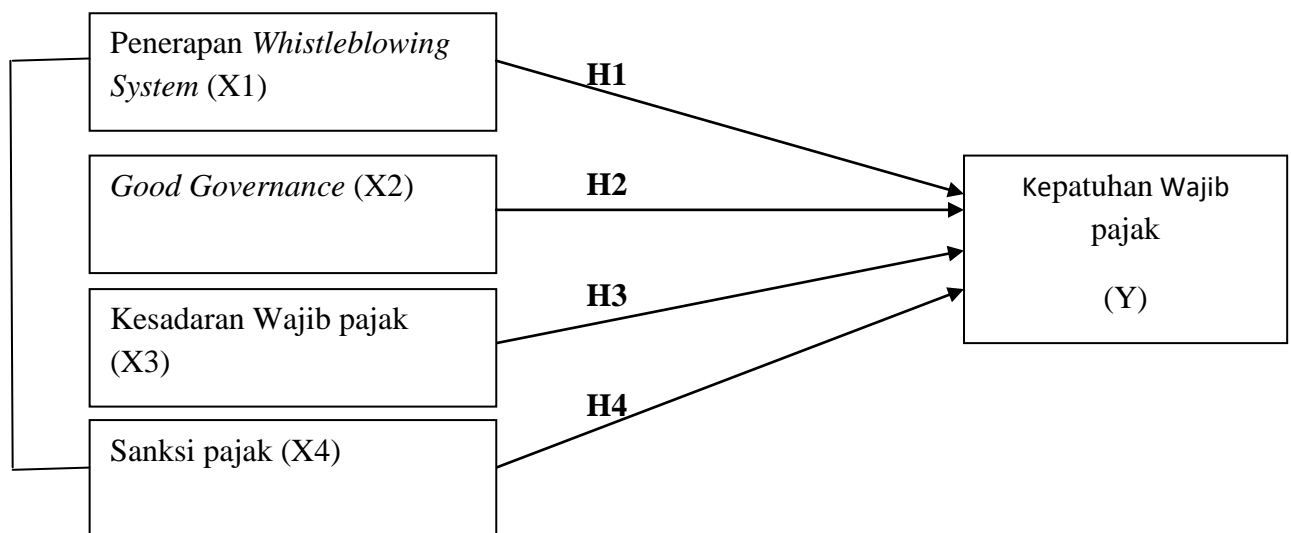
2. Syska Lady Sulistyowati dan Reza Widhar Pahlevi
Jurnal Penerapan *Good Governance, Whistleblowing Sysytem* Dan Resiko Sanksi jak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman.
Good Governace, Whistl eblowing System, Resiko Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak
Kuantitatif Kausalitas
Terdapat pengaruh antara penerapan *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan risiko sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Indar Khaerunnisa dan Adi Wiratno
Jurnal Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak Dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Moralitas Pajak, Budaya Pajak, *Good Governance*, dan Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian Deskriptif
Terdapat Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandhika Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum
Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran, pengetahuan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak
Statistik Deskriptif
Kesadaran Wajib pajak dan Pengetahuan pajak secara bersama – sama beepengaruh secara significant terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi. Namun apabila di lihat secara parsial hanya variabel pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh secara significant terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. I Made Wahyu caahyadi dan I Ketut Jati
Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi , Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermontor
Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik ,sanksi Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
Pendektan kualitatif yang berbentuk asosiatif
Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan public dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

6.	Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan , dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	Tarif Pajak, pemahaman Perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
----	---	--	---	---------------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang di tulis sebelumnya, dan permasalahan yang akan di teliti, maka kerangka pikir dalam penelitian ini akan di gambar sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang pada saat diungkapkan belum di ketahui kebenarannya dan masih harus di buktikan kebenarannya secara empiris.³⁶

Sedangkan pengembangan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah .

2.4.1 Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Whistleblowing System adalah suatu alat yang di gunakan untuk mencegah kebocoran – kebocoran pajak yang di lakukan oleh fiskus untuk mencegah dan melakukan deteksi dini

³⁶ Gelo, W, Metodologi penelitian, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia ,2002,h.42

atas pelanggaran yang ada di lingkungan DJP (Direktorat Jendral Pajak).³⁷ Dengan cara melakukan peningkatan peran pegawai dan masyarakat secara aktif sebagai pelapor pelanggaran (*Whistleblower*). Pada tanggal 19 Agustus 2011, DJP membuat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22 / PJ / 2011 tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Whereson Siringoringo (2015) menyatakan hasil bahwa penerapan *Whistleblowing Sytem* di lingkungan DJP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi. Hal ini dinyatakan bahwa dengan adanya penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan DJP menunjukkan bahwa DJP lebih serius dalam menghadapi dan memberantas korupsi serta penyelewengan yang dilakukan, sehingga diharapkan adanya *Whistleblowing System* dapat mengemblikan kepercayaan masyarakat sehingga akan menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan benar penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadikan wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar Pajak.

Dari Kesimpulan atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penerapan *WhistleBlowing System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Good Governance adalah suatu tata kelola organisasi yang baik dengan menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan , keadilan dan dapat di pertanggungjawabkan.³⁸ DJP menerapkan *Good Governance* yang dapat di lihat dalam konteks mekanisme internal maupun eksternal. Mekanisme internal lebih fokus terhadap bagaimana pimpinan DJP dalam mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip – prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat di pertanggung jawabkan, sedangkan dalam mekanisme eksternal DJP menekankan tentang bagaimana interaksi DJP dengan pihak eksternal berjalan dengan baik tanpa mengabaikan pencapaian tujuan Organisasi.

³⁷ Whereson Siringoringo, “Jurnal Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi) ”, Jurnal Akuntansi Vol.XIX(02) hal 207.

³⁸ Abdul Wahid Oesman, “jurnal Mewujudkan *Good Governance* Direktorat Jendral Pajak Dengan *Reinventing Government*”, Jurnal EKSIS Vol.6.No.2 hal 1440-1605

Menurut penelitian Sulistyowati, Pahlevi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *Good Governance* dengan kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaan transparansi upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan melalui gerakan reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan maupun administrasi perpajakan dengan melalui penerapan serta pelaksanaan *Good Governance* . Semakin baik penerapan *Good Governance*, yang meliputi prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan pelayanan yang prima di lingkungan DJP akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak .

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib pajak adalah suatu perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh system dan ketentuan perpajakan .³⁹ Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailil (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kab. Grobogan. Pandangan positif wajib pajak dengan adanya pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak. Maka dari itu jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat , sehingga masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang pajak agar mengerti akan tujuan, fungsi dan manfaat pajak. Sehingga akan timbul rasa sadar dari diri masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

³⁹ Aryo prakoso, galih Wicaksono, Suugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandka Ciptaa Bidhari, Nurchayaning Dwi kusumaningrum, *Jurnal Pengaruh Kesadaran dan Pengetuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Vol. 04No.01 2019 Hal. 5

2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah suatu ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang di jadikan jaminan agar di taati dan di patuhi oleh wajib pajak, atau bisa di katakan sanksi pajak memiliki tujuan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan ⁴⁰

Sanksi pajak memiliki tujuan agar tercapainya penerimaan pajak secara baik ,sehingga di butuhkan penegakkan hukum yang tegas di bidang perpajakan dalam menegakkan *self assessment system*, di karenakan sesuai dengan isi dari pengertian pajak sebagai iuran wajib yang di paksakan sesuai dengan Undang – Undang, penegakkan hukum berrati pemberian sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang di lakukan dalam melaksanakan perpajakan.

Penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo (2015) menyatakan bahwa resiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi , memperkuat pengaruh *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak dan resiko sanksi pajak sebagai variable moderasi, juga memperkuat pengaruh *Whistle Blowing System*. Kemudian di dukung dengan Penelitian lain yang di lakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviri (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin berat dan ketat sanksi pajak yang di terapkan di DJP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak di berlakukan untuk memberi motivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di tarik hipotesis sebagi berikut :

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

⁴⁰ Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta:Andi,2006, hal. 39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filosofi positivis, yang bertujuan untuk menguji suatu populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, serta menganalisis data kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya⁴¹.

Pada penelitian jenis ini menghasilkan penemuan yang dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran. Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada suatu kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hubungan dari beberapa variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif..⁴²

3.2 Sumber Penelitian

a. Data primer

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.⁴³ Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder berbeda dengan data primer, data primer didapat langsung oleh peneliti sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel – variabel yang telah di kumpulkan dan di himpun sebelumnya oleh pihak lain atau pihak ketiga. Data sekunder di klasifikasikan menjaadi dua yaitu Internal Data dan eksternal data. Data ini didapatkan dari berbagai situs laman website terkait ataupun buku maupun jurnal. Peneliti menggunakan data sekunder ini dengan mengambil data yang bersumber dari KPP Pratama Pati dan literatur- literatur yang berkaitan dengan wajib pajak.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.8.

⁴² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h.130-131.

⁴³ Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri, 2017. hal.115

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya yang menjadi sasaran peneliti⁴⁴. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh – tumbuhan, udara, gejala, nilai maupun peristiwa .penelitian ini menggunakan populasi penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di dalam KPP Pratama Pati.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana , dan waktu, Sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut .⁴⁵

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Probability sampling* yaitu penarikan sampel yang berdasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel .sehingga, dalam rancangan ini tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu dengan yang lainnya, karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.⁴⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *simple random sampling*. Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 368.944 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati pada tahun 2020 . Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{368.944}{1+368.944.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{368.944}{1+3960,44}$$

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2017, hal.80.

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.2017. hal. 117.

$$n = 99,97$$

$$n = 100$$

Dari Perhitungan menggunakan rumus di atas dari keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dapat di gunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dan teknik ilmiah yang di lakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis yang berguna untuk keperluan analisis.⁴⁷

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner atau Angket

Angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.⁴⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya ,hasil observasi atau wawancara dan sebagainya. Data yang di peroleh dari dokumentasi kebanyakan berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki arti untuk di interpretasikan.⁴⁹

3.5 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel yang di gunakan yaitu variabel Independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau Variabel terikat

3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi , menjelaskan, dan menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada

⁴⁷<https://www.google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp> diunduh pada minggu 28 juni 2020 pukul. 15.10

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal.142.

⁴⁹ Aglis Andhita Hatmawan, Slamet Riyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen , Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta:Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020, hal.28

variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini yaitu *Whistleblowing System, Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.

3.5.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau di terangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat memengaruhi variabel yang lain. Variabel Dependen pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari Pengertian Variabel independen dan Dependen di atas di dukung oleh pernyataan Tuckman , yaitu : *The independent variable, which is a stimulus variabel o input, operates either within a person or within his environment to affect his behavior. It is that factor which measured, manipulated, or selected by experimenter to determine its relationship to an observed phenomenon.* Sedangkan Freankle dan Wallen menjelaskan konsep variabel bebas dalam bentuk contoh bahwa variabel bebas (*independent variabel*) adalah : *treatment o manipulated variabel referred to revioisly : those variables the investigator chooses to study (and often manipulate) in order to asses their possible effect(s) on one or more other variabel* . Dari segi letaknya dalam kerangka berpikir konseptual penelitian , variabel bebas lebih dahulu, dan dapat mempengaruhi atau menerangkan variabel terikat, bukan sebaliknya.⁵⁰

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis menggunakan statistik Deskriptif yaitu Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵¹ Dalam penelitian ini analisis deskriptif di gunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh Penerapan *Whistleblowing System, Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Saksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji Instrumen penelitian merupakan proses menganalisis data dengan cara mensistematiskan apa yang sedang di teliti dan mengatur hasil wawancara yang di lakukan

⁵⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: KENCANA (Divisi Dari Prenadamedia), 2014, hal 109-110.

⁵¹ Ibid....hal.147

dan di pahami agar bisa menyajikan apa yang di dapatkan dari orang lain. Analisis data memiliki tujuan untuk mencari makna di balik data, melalui subyek pelakunya. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Validasi

Uji Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrument penelitian. Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument di katakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan di ukur. Uji kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir – butir kuesioner.⁵²

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur kejadian yang sama. Pada alat pengukur permasalahan bisnis yang mencakup fenomena sosial seperti sikap ,opini, dan persepsi, pengukuran konsisten agak sulit dapat dicapai.

Gejala sosial berbeda dengan gejala fisik, oleh karena itu dalam mengukur gejala sosial selalu diperhatikan unsur kesalahan pengukuran. Dalam penelitian sosial, kesalahan yang terjadi pada pengukuran ini cukup besar, sehingga untuk mengetahui hasil pengukuran yang sebenarnya perlu diperhatikan kesalahan dalam pengukuran ini. Hasil pengukuran gejala sosial merupakan kombinasi skor yang benar ditambah dengan kesalahan pengukuran.⁵³

3.7 Uji Asumsi Klasik :

Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus di lakukan yaitu :

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan suatu uji yang berguna untuk mengukur apakah data yang di dapatkan memiliki distribusi normal atau tidak normal , sehingga pemilihan statistic dapat dilakukan dengan tepat.⁵⁴

⁵² *ibid*....hal.63

⁵³ Husein Umar, *Riset Bisnis Di Lengkapi Contoh Proposal Hasil Riset Bidang Manajemn dan Akuntansi*, Jakarta: Grmedia,2003, hal.114.

⁵⁴ Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Yogyakarta :DEEPUBLISH, 2012, hal.81

3.7.2 Uji Multikolonieritas

Pengujian terhadap multikolinieritas berguna untuk mengetahui antar variabel bebas it saling berkorelasi. Jika hal ini terjadi maka sangat sulit untuk enentukan variabelbebas mana yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Di antara variabel independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat di gunakan dalam persamaan.

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini terjadi pada model - model penelitian yang menggunakan data *cross section* daripada *time series*. Namun bukan berarrti model – model yang menggunkana data time series bebas dari uji heterokedastisitas.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakan hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, \dots X_n$) dan variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami peningkatan atau penurunan.⁵⁵

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik yang di dukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut :

3.8.1 Uji Signifikansi Parsial (T- test)

Uji-T yaitu salah satu metode uji parametrik. Ini adalah instrumen statistik yang digunakan untuk memeriksa seberapa sering hasil pengamatan dapat terjadi di karenakan kebetulan. Uji parametrik membuat asumsi tentang populasi dari data yang diperoleh dari sampel. Statistic parametric di gunakan untuk membandingkan *mean* atau nilai rata – rata sampel yang diamati dengan nilai rata- rata yang diharapkan secara normal dari distribusi nilai rata – rata.⁵⁶

⁵⁵FI. Sigit Suyantorr, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan menggunakan SPSS*, Semarang : WAHANA KOMPUTER, hal.143

⁵⁶ Morissan ,*Statistik Sosial*, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016,hal.187

3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (F- test)

Untuk menguji pengaruh bersama antara penerapan *Whistleblowing System* (X1), *Good Governance* (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sanksi perpajakan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

- Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka keputusannya menerima hipotesis nol (H_0) , artiya masing masing variable X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).
- Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka keutusnya menolak (H_0) , dan menerima hipotesis alternatif (H_a) artinya secara bersama – sama variable X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh significant terhadap variabel (Y).

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (Penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

.Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi

3.9 Definisi Operasional

Berikut ini merupakan ringkasan definisi operasional dari variabel dan indikator penelitian yang akan digunakan untuk menyusun kuesioner.

Tabel 3 Definisi Operasional

No.	Definisi	Variabel	Indikator	Skala
1.	Nurmantu (2005) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Benar dalam perhitungan pajak terutang 2. Benar dalam pengisian SPT 3. Tepat waktu dalam melaporkan SPT 4. Melakukan kewajiban dengan cara sukarela sesuai dengan aturan perpajakan..	Diukur melalui angket/ kuesioner dengan menggunakan skala likert.
2.	Siringoringo (2015) mendefinisikan bahwa <i>Whitleblowing System</i> merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencegah kebocoran – kebocoran pajak yang dilakukan fiskus untuk mencegah dan mendeteksi secara dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan	Penerapan <i>Whitleblowing System</i>	Indikatornya terdiri : 1. Membangun budaya amanah dan keterbukaan. 2. Metode dan saluran yang di gunakan. 3. Pengaduan dengan atau tanpa identitas 4. Ketidakwajaran atau penyimpangan yang dapat di laporkan 5. Tindak lanjut dan prosedur pelaporan.	Di ukur melalui angket kuisisioner dengan menggunakan skala likert.

Direktorat Jendral
Pajak dengan
meningkatkan
peran pegawai dan
masyarakat untuk
menjadi pelapor
pelanggaran /
Whistleblower .

- | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|---|
| 3. | <p>Dwiyantto dalam
gunadi (2013, <i>good governance</i>
merupakan suatu
kepemerintahan
yang baik. Yang
memiliki hubungan
sinergis dan
konstruktif di antar
Negara, swasta ,
dan society yait
melalui pelayanan
publik. Pelayanan
publik dalam
pelayanan pajak
yaitu DJP
bertanggungjawab
dalam memungut
pajak haus
menerapkan <i>Good Governance</i>,
kepada seluruh
pihak atau instansi
yang di bawah DJP
sebagai pelaksana
yang memberikan
pelayanan pajak.</p> | <p><i>Good Governance</i></p> | <p>Indikatornya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang Akuntabel (<i>Accountability</i>) 2. Pelayanan yang efektif dan Efisiensi (<i>indepedency</i>) 3. Pelayanan yang Partisipatif (<i>Responsibility</i>) 4. Pelayanan yang Non Partisan atau keadilan (<i>Fairness</i>) Merata. 5. Pelayanan yang Transparan (<i>Transparancy</i>) | <p>Di ukur
melalui angket
kuisisioner
dengan
menggunakan
skalalikert.</p> |
| 4. | <p>Jotopurnomo dan</p> | <p>Kesadaran wajib</p> | <p>Indikatornya yaitu :</p> | <p>Di ukur</p> |

	mangonting (2013)	pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 2. Kesadaran bahwa penundaan pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. 3. Kesadaran bahwa pajak di tetapkan dengan Undang – Undang dan dapat di paksakan. 4. Kesadaran Lahir dari dalam diri sendiri.. 	<p>melalui angket kuisisioner dengan menggunakan skala likert.</p>
5.	Pahlevi (2018),	Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui tujuan adanya sanksi pajak. 2. Adanya sanksi sebagai sarana pendidikan 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. 4. sanksi di terapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 5. Beban Sanksi Pajak 	<p>Di ukur melalui angket kuisisioner dengan menggunakan skala Likert.</p>
	suatu sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak apabila tidak patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, namun sanksi tidak akan di berikan apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.			

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan integerasi dari tiga kantor operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Dengan adanya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Pembentukan KPP tidak dimaksudkan semata hanya untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, melainkan pembentukan KPP lebih diarahkan kepada pelunasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama menerapkan system administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut: organisasi yang berdasarkan fungsi, system informasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor telah menerapkan kode etik yang ketat diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan dikantor telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. KPP Pratama Pati terdapat petugas Account Representative (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak secara intensif. Dengan adanya peran AR tersebut diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan secara berkesinambungan.

KPP Pratama Pati lahir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 279/KMK/1/1989 dari Kantor Dinas Luar (KDL) Tk.I Pati yang berada dibawah KPP Pratama Kudus, serah terima dilakukan pada tanggal 26 September 1989 kemudian peresmian kantor baru dilakukan padatanggal 16 Oktober 1989.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007, ditetapkan saat mulai beroperasi KPP Pratama Pati pada tanggal 6 November 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tepatnya berada di Jalan Panglima Sudirman No.64 Pati, Wilayah kerja KPP Pratama Pati meliputi 2 wilayah kabupaten yaitu pemerintah kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Pati

a. Tugas Pokok KPP Pratama Pati

KPP Pratama Pati memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Fungsi KPP Pratama Pati

KPP Pratama Pati memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Pratama Pati menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan pajak.
- e) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j) Pelaksanaan intensifikasi.
- k) Pembetulan ketetapan pajak.

l) Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

m) Pelaksanaan administrasi Kantor

4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Pati

a. Visi KPP Pratama Pati

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

b. Misi KPP Pratama Pati

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4.1.4 Kode Etik KPP Pratama Pati

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.
3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung.
4. Menyalahgunakan fasilitas kantor.
5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari WP, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan.
7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan atau perubahan data pada system informasi milik DJP.

8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisa Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, kuesioner di bagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di wilayah kabupaten Pati. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi, kemudian sampel yang di gunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Penyebaran kuesioner yang pertama yaitu dengan uji instrument dengan 20 responden yang kemudian di lanjut dengan penyebaran ke 100 sampel yang telah di tentukan. Dalam penelitian terdapat empat variaabel dependen yaitu penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen nya yaitu Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini di lakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu, adapun klasifikasi responden di antaranya : jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Hasil distribusi sampel dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	103	103%
Kuesioner yang tidak digunakan	3	3%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total kuesioner yang masuk dalam form kuesioner berjumlah 103 responden, berasarkan sesuai rumus yang diguakan untuk menentukan sampel maka sampel yang di analisis sebanyak 100 responden.

Tabel 5 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	48	48%
Perempuan	52	52%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klsifikasi responden yang menjadi subjek penelitian yaitu responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 48 responden atau setara dengan 48% Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 52 atau setara dengan 52% . Jadi dapat di lihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki – laki.

Tabel 6 KLASIFIKASI BERDASARKAN UMUR

Usia	Jumlah	Presentase
21 – 30 Tahun	36	36%
31 – 40 Tahun	27	27%
41 – 50 Tahun	22	22%
➤ 50 Tahun	15	15%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel klasifikasi responden berdasarkan umur dapat di lihat presentasenya bahwa responden yang berumur antara 21 – 30 tahun berjumlah 36 responden atau 36%. Kemudian jumlah responden yang umur 31 -40 tahun sebanyak 27 responden atau 27%. Sedangkan jumlah responden yang berumur 41 – 50 tahun sebanyak 22 responden atau

22% . dan untuk responden yang berumur lebih dari 50 tahun keatas berjumlah 15 orang atau setara deng 15%.

Tabel 7 KLASIFIKASI BERDASARKAN PEKERJAAN

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Swasta	36	36%
PNS	35	35%
Lainnya	29	29%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarkan pekerja dari responden sebagai berikut, yaitu responden yang pekerjaannya sebagai pegawai swasta berjumlah 36 atau 36%. Sedangkan responden yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 35 responden atau 35% . Dan untuk responden yang memiliki pekerjaan lainnya seperti pedagang, petani, sebanyak 29 responden atau 29% .

4.3 Teknik Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui deskripsi dari setiap masing – masing variable seperti dari nilai rata – rata (mean), median, standar deviasi ,nilai maximum, dan nilai minimum .Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Whistleblowing System* (X1), *Good Governance* (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil dari uji data bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Uji Statistik Deskriptif

		Statistics				
		WBS	Good Governance	Kesadaran WP	Sanksi	Kepatuhan WP
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		43.39	43.61	35.73	43.68	35.50
Median		45.00	44.00	37.00	45.00	36.00
Std. Deviation		5.421	4.383	3.484	4.752	3.529
Minimum		30	31	26	32	24
Maximum		50	50	40	50	40

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat di ketahui nilai rata – rata (mean), median, standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut :

a. *Whistleblowing System*

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel *Whistleblowing System* menunjukkan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 43,39, nilai median sebesar 45,00, standar deviasinya sebesar 5,421, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai minimum sebesar 30.

b. *Good Governance*

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel *Good Governance* menunjukkan nilai rata – rata (mean) sebesar 43,61, nilai median sebesar 44,00, standar deviasinya sebesar 4,383, nilai maksimum sebesar 50, dan minimum sebesar 30.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis statistic dekriptif terhadap vaariabel kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai rata – rata (mean) sebesar 35,73, nilai median sebesar 37,00,

standar deviasinya sebesar 3,484, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai minimumnya sebesar 26.

d. Sanksi Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai rata- rata (mean) sebesar 43.68, nilai median sebesar 45.00 , standar deviasinya sebesar 4.752, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai minimumnya sebesar 32.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai rata- rata (mean) sebesar 35.50, nilai median sebesar 36.00, standar deviasinya 3.529, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai minimumnya sebesar 24.

4.3.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan setiap indikatornya dalam suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk membuktikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yaitu :

- Jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka angket dinyatakan valid.
- Jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel maka angket dinyatakan tidak valid.

Untuk menentukan nilai r tabel rumusnya seperti di bawah ini :

$R \text{ tabel} = N-2$ $R \text{ tabel} = 100-2 = 98 \text{ (0,196)}$ $\text{Nilai signifikansi } 5\% = 0,05$
--

Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9 Uji Validitas

No	Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (X1)				
1.	WBS 1	0,754	0,196	Valid
2.	WBS 2	0,751	0,196	Valid
3.	WBS 3	0,676	0,196	Valid
4.	WBS 4	0,659	0,196	Valid
5.	WBS 5	0,694	0,196	Valid
6.	WBS 6	0,698	0,196	Valid
7.	WBS 7	0,792	0,196	Valid
8.	WBS 8	0,631	0,196	Valid
9.	WBS 9	0,657	0,196	Valid
10.	WBS 10	0,776	0,196	Valid
<i>Good Governance</i> (X2)				
1.	GG 1	0,700	0,196	Valid
2.	GG 2	0,615	0,196	Valid
3.	GG 3	0,573	0,196	Valid
4.	GG 4	0,673	0,196	Valid
5.	GG 5	0, 527	0,196	Valid
6.	GG 6	0,615	0,196	Valid
7.	GG 7	0,449	0,196	Valid
8.	GG 8	0,552	0,196	Valid
9.	GG 9	0,651	0,196	Valid

10.	GG 10	0,629	0,196	Valid
-----	-------	-------	-------	-------

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

1.	Kes 1	0,626	0,196	Valid
2.	Kes 2	0,646	0,196	Valid
3.	Kes 3	0,593	0,196	Valid
4.	Kes 4	0,628	0,196	Valid
5.	Kes 5	0, 712	0,196	Valid
6.	Kes 6	0,613	0,196	Valid
7.	Kes 7	0,509	0,196	Valid
8.	Kes 8	0,715	0,196	Valid

Sanksi Pajak (X3)

1	Sanksi 1	0,563	0,196	Valid
2	Sanksi 2	0, 546	0,196	Valid
3	Sanksi3	0,722	0,196	Valid
4	Sanksi 4	0,612	0,196	Valid
5	Sanksi 5	0, 644	0,196	Valid
6	Sanksi 6	0,584	0,196	Valid
7	Sanksi 7	0,635	0,196	Valid
8	Sanksi 8	0,604	0,196	Valid
9	Sanksi 9	0,618	0,196	Valid
10	Sanksi 10	0,527	0,196	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1	Kep 1	0,634	0,196	Valid
2	Kep 2	0,613	0,196	Valid

3	Kep 3	0,537	0,196	Valid
4	Kep 4	0,612	0,196	Valid
5	Kep 5	0, 613	0,196	Valid
6	Kep 6	0,642	0,196	Valid
7	Kep 7	0,678	0,196	Valid
8	Kep 8	0,706	0,196	Valid

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir angket yang digunakan dalam variabel *Whistleblowing System* (X1), *Good Governance* (X2) , kesadaran wajib pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Pati dinyatakan valid karena masing-masing $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196).

4.3.3 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk membuktikan bahwa kuesioner penelitian yang di gunakan untuk pengumpulan data dari setiap variabel penelitian konsisten atau tidak. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah dengan melihat nilai *cronbach alpha* (α), suatu variabel dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* (α) ≥ 0.60 . Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 10 UJI REABILITAS

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Critical Value</i>	Keterangan
X1	0,888	0,60	Reliabel
X2	0,798	0,60	Reliabel
X3	0,785	0,60	Reliabel
X4	0,804	0,60	Reliabel
Y	0,776	0,60	Reliabel

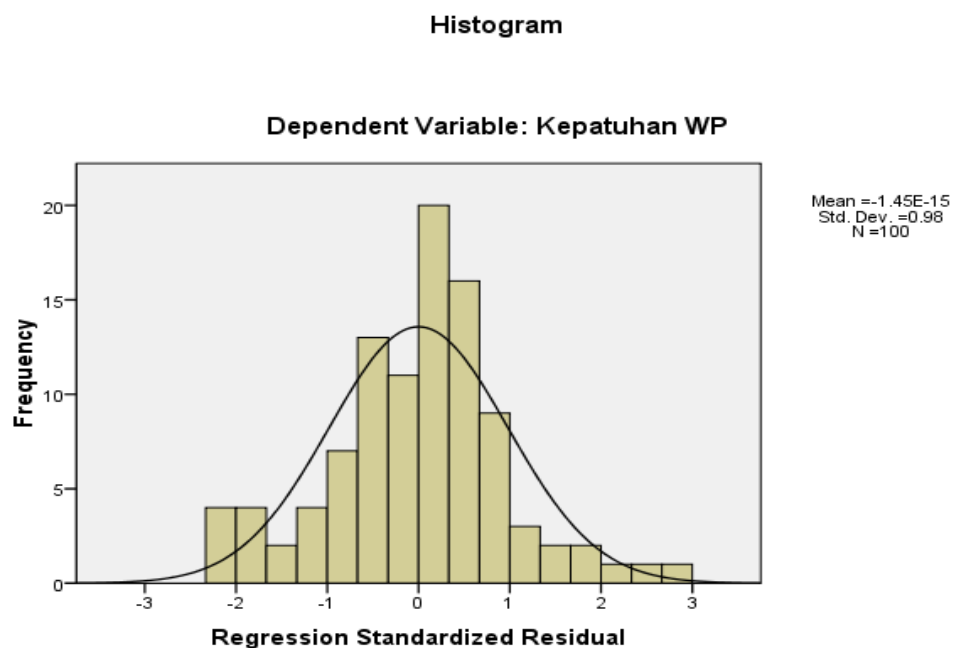
Dari uji reabilitas di atas dapat di ketahui bahwa koefisien reabilitas yaitu di antara 0,776 sampai 0,888 angka itu menyatakan bahwa seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat di ketahui bahwa seluruh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat di percaya sehingga dapat di gunakan sebagai alat pengumpul data.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang di gunakan untuk mengukur atau mengetahui apakah data yang di dapatkan berdistribusi normal.

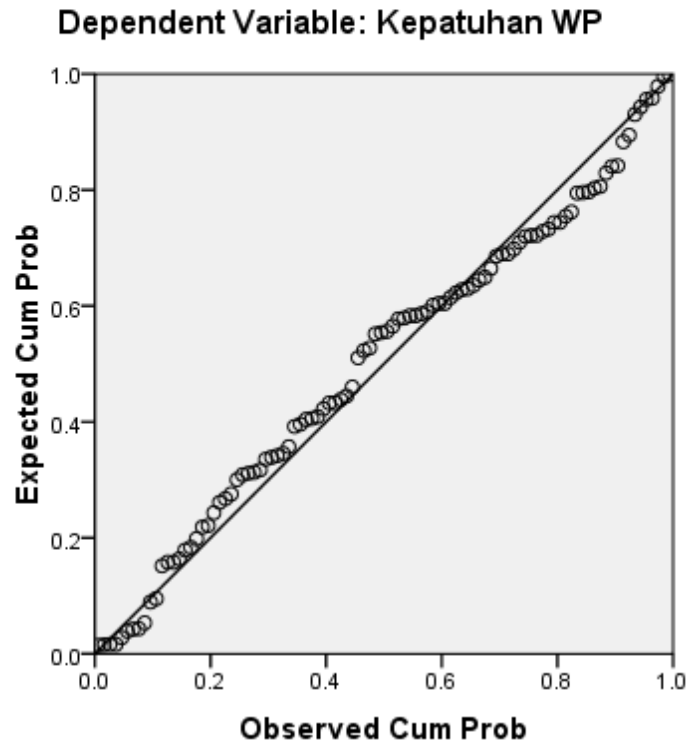
Gambar 2 Histogram Uji Normalitas



Dapat di lihat dari gambar histogram di atas bahwa pola yang terdapat pada grafik histogram tidak menceng (*skewnes*) sehingga data penelitian dapat berdistribusi normal.

Gambar 3 Uji normalitas P_Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan uji Normal P_P Plot of Regressions Standarized residual dapat di ambil keputusan yaitu jika data plotting atau titik – titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal maka model regresi dapat berdistribusi normal. Pada gambar di atas data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi dikatakan berdistribusi normal. Untuk meyakinkan normalitas bisa juga menggunakan Uji Statistik Kolmogorof smirnov (K-S). Hasil dari uji normalitas dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Uji Normalitas One- Sample K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26057172
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.069
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.666
a. Test distribution is Normal.		

Uji Normalitas menggunakan metode Kolmogorof Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Dasar yang di gunakan untuk pengambilan keputusan uji One Sample Kolmogrof Smirnov yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Pada tabel diatas dapat di lihat yaitu nilai residual sebesar $0,727 > 0,05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal. Sehingga penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi di temukan adanya korelasi yang kuat antara variabel dependen dan baribel independen. Hasil uji multikolonieritas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.961	2.771		3.234	.002		
	WBS	.284	.071	.436	3.974	.000	.359	2.786
	Good Governance	.038	.071	.047	.534	.595	.555	1.803
	Kesadaran WP	.052	.102	.051	.509	.612	.428	2.335
	Sanksi	.245	.068	.330	3.588	.001	.509	1.964

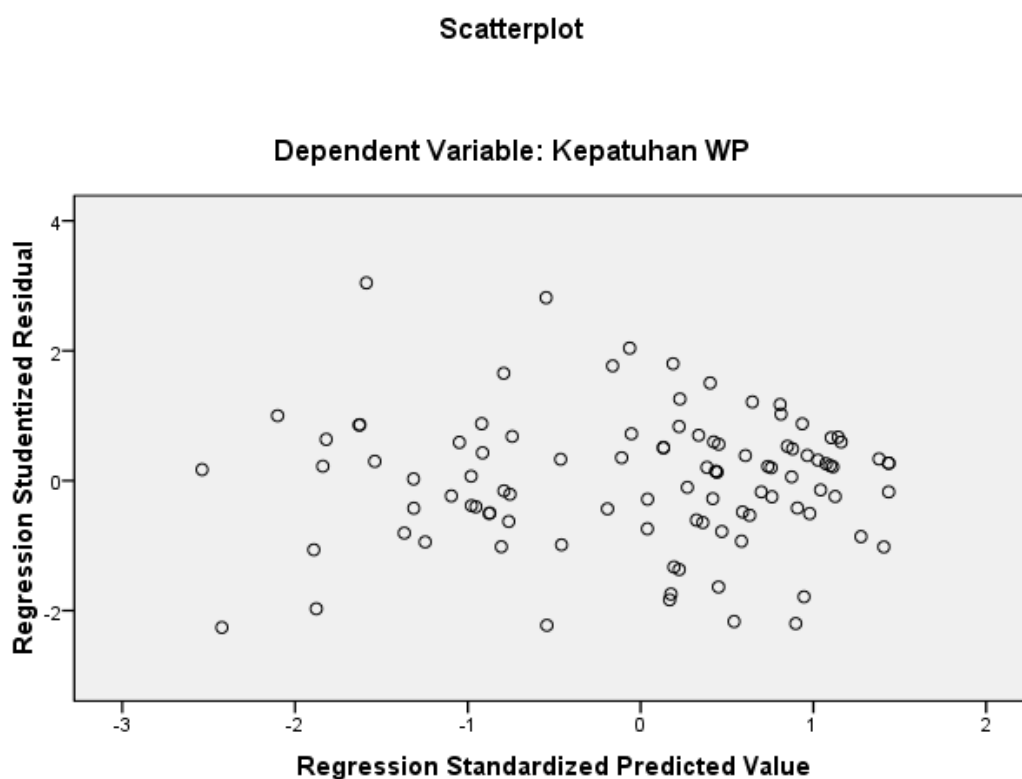
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Dalam uji multikolonieritas dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai VIF < 10, maka nilai multikolonieritas dapat di toleransi atau tidak terjadinya multikolonieritas. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF *Whistleblowing System* (X1) sebesar 2,786, *Good Governance* (X2) sebesar 1,803 , Kesadaran WP (X3) sebesar 2,335, dan Sanksi Pajak Sebesar 1,964 berarti dapat di ketahui baaahwa nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga kesimpulannya adalah dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang kuat , sehingga telah memenuhi uji asumsi multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedasitas

Uji ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Uji heterokedastisitas ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien dan akurat. Sehingga bisa di katakan bahwa model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitin ini, uji heterokedasitas menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik – titik grafik regresi dan uji *Glejser* .

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Dapat di lihat pada grafik scatterplot di atas bahwa titik – titik yang ada pada grafik tersebut tidak membentuk suatu pola, sehingga kesimpulannya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui lebih jelasnya bisa dengan melakukan uji *Glejser*. Uji *Glejser* ini dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel independen dengan nilai absolute dari residualnya. Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan jika nilai significant kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas , dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Uji Heteroskedasitas dengan Uji *Glejser*

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	3.188	1.726		1.847	.068
	WBS	-.046	.044	-.174	-1.044	.299
	Good Governance	.033	.044	.100	.750	.455
	Kesadaran WP	.059	.063	.143	.939	.350
	Sanksi	-.069	.043	-.227	-1.622	.108

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel penerapan *Whistleblowing System* (X1) sebesar $0,299 > 0,05$, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel *whistleblowing system* (X1), sedangkan diketahui bahwa nilai signifikansi *Good Governance* (X2) sebesar $0,455 > 0,05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel *Good Governace* (X2). Variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan nilai signifikansi $0,350 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel kesadaran wajib pajak (X3) dan pada sanksi perpajakan (X4) nilai signifikansinya $0,108 > 0,05$, artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam variabel sanksi perpajakan (X4).

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengetahui pengaruh langsung secara parsial atau bersama – sama dari setiap variabel yang digunakan. Hasil uji regresi linier berganda dari variabel *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran WP , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Pati dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Uji analisis Regresi Linier

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.961	2.771		.002
	WBS	.284	.071	.436	.000
	Good Governance	.038	.071	.047	.595
	Kesadaran WP	.052	.102	.051	.612
	Sanksi	.245	.068	.330	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut :

$$Y = 8,961 + 0,284X_1 + 0,038 X_2 + 0,052X_3 + 0,245X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat di jelaskan bahwa :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 8,961 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran WP, dan Sanksi Pajak tidak terjadi perubahan (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 bernilai 0), maka nilai variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 8,961.

b. *Whistleblowing System* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak

Koefisien regresi pada variabel *Whistleblowing System* sebesar 0,284 atau sebesar 28,4% .hal ini berarti setiap kenaikan *Whistleblowing System* 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,284 atau 28,4% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. *Good Governance* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi pada variabel *Good Governance* sebesar 0,038 atau sebesar 3,8 % .hal ini berarti setiap kenaikan *Good Governance* 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,038 atau 3,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,052 atau sebesar 5,2 % .hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,052 atau 5,2% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

e. Sanksi Pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar sebesar 0,245 atau sebesar 24,5% .hal ini berarti setiap kenaikan sanksi pajak 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,245 atau 24,5% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besar prosentase variasi variabel independen yang di gunakan dlam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 15 Uji Determinasi Koefisien R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.590	.572	2.308

a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel diatas R Square menunjukkan bahwa pengaruh nilai *Whistleblowing System* (X1), *Good Governnce* (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) secara simultan sebesar 59 %. Sedangkan sisanya ($100\% - 59\% = 41\%$) di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.5.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel *Whistleblowing system*, *Good Governance*, Kesadaran wajib pajak,dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah membandingkan nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% atau ($\alpha = 0,05$), N = jumlah sampel, k = jumlah variabel independen $df = n-k = (100 - 4) = 96$, maka diperoleh nilai t tabel = 1.985.

Kriteria uji T yaitu :

a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen .

b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen .

Tabel 16 Uji Signifikan T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.961	2.771		3.234
	WBS	.284	.071	.436	3.974
	Good Governance	.038	.071	.047	.534
	Kesadaran WP	.052	.102	.051	.509
	Sanksi	.245	.068	.330	3.588

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu *Whistleblowing System* , di peroleh t hitung sebesar 3,974 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_1 di terima . sehingga dapat di simpulkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu *Good Governance* , di peroleh nilai t hitung sebesar 0,534 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,595 maka H_2 di tolak . Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu kesadaran wajib pajak, di peroleh nilai t hitung sebesar 0,509 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,612 maka H_3 di tolak . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang keempat yaitu sanksi pajak, di peroleh nilai t hitung sebesar 3,588 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 maka H4 di terima . Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Uji F (Simultan)

Uji F dalam penelitian bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel terikat terhadap variabel bebas secara simultan atau bersama-sama Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen (*Whistleblowing System, Good Governance, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak*) yang secara simultan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) . Tingkat signifikansi menggunakan (α) = 5% atau 0,05.

Dari uji regresi dengan SPSS dapat di lihat bahwa hasil uji F elalui output tabel anova sebagai berikut :

Tabel 17 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727.092	4	181.773	34.134	.000 ^a
	Residual	505.908	95	5.325		
	Total	1233.000	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai F sebesar 34,134 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukan bahwa variabel *Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak* secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6 Pembahasan dan Analisis Data

4.6.1 Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H1 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel *Whistleblowing System* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan peroleh t hitung sebesar 3,974 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H1 di terima yang artinya bahwa variabel *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, Pahlevi (2018) dan Naili (2017) bahwa penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan DJP maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Salah satu pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah penerapan perpajakan yang transparan, karena transparansi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Salah satu cara untuk mendorong transparansi adalah dengan penerapan *Whistleblowing System* atau pengawasan.

Whistleblowing System merupkn aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan yang berguna bagi masyarakat yang mempunyai informasi dan ingin melaporkan tindakan yang berindikasi pelanggaran yang telah terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.wise.kemenkeu.go.id). Mencegah dan mendeteksi sejak dini pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan DJP yaitu dengan meningkatkan pegawai dan masyarakat menjadi *whistleblower*. Jenis pengaduan antara lain pelayanan yang kurang memadai, fasilitas kantor yang terbatas, kode etik dan disiplin PNS, serta tindak pidana perpajakan.⁵⁷

⁵⁷ Nailil Ulfatus Syariah, “Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System*, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Grobogan” Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta ,2017 .

Dengan penerapan perpajakan yang transparan melalui pengawasan *Whistleblowing System* akan mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada DJP sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan meningkat.

4.6.2 Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak . Hal ini di buktikan dengan Uji T yang memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,595 di peroleh nilai t hitung sebesar 0,534 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H2 di tolak yang artinya bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Siringoringo (2015) yang menyatakan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum memahami adanya pelaksanaan *Good Governance* di lingkungan Direktorat Jendral Pajak . Padahal penerapan *Good Governance* sangat di butuhkan dalam suatu organisasi khususnya di lingkungan KPP Pratama Pati yang bergerak di bidang pelayanan harus lebih objektif dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Semakin rendah pemahaman yang di terapkan dan kurang sesuai dengan kode etik, sehingga akan rendahnya pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangann maupun pelanggaran melalui pengawasan yang akuntanbel dan berkeadilan.

Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa penerapan *Good Governance* harus lebih di tingkatkan kedalam pemahaman wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak belum memahami dan merasakan pelayanan yang memadai sehingga kepatuhan wajib pajak setiap tahun cukup rendah. Maka dari itu ketika mengadakan sosialisasi perpajakan yang harus lebih di tekankan lagi kepada masyarakat bahwa Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan *Good Governance* untuk mendorong kepatuhan pajak baik untuk wajib pajak , pegawai pajak, maupun pejabat pajak melalui transparansi pengelolaan pajak di segala bidang baik bidang administrasi maupun pengelolaan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan pajak.

4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H3 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,612 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,509 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H3 ditolak yang artinya bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2017) dan Lydiana (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan rasa mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di rasa masih sangat kurang oleh sebagian besar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Padahal kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan wajib pajak dalam melunasi kewajibann perpajakannya untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sisi pajak⁵⁸.

Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DJP dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela bagi wajib pajak, salah satunya dengan melakukan sosialisasi, menanamkan pemahaman dan penegakan perpajakan mulai dari lingkungan keluarga terdekat, disamping memberikan kemudahan dalam segala urusan kewajiban. . perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan kurang, wajib pajak enggan datang ke KPP. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam mengetahui pentingnya perpajakan bagi negara maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, namun sebaliknya jika kesadaran wajib pajak kurang maka kepatuhan wajib pajak akan rendah.

⁵⁸ Lydiana, Pengaruh Kesadraan Wajib Pajak, “*Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeg*”. Jurnal ilmiah Vol.7.No.1 hal 129

4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H4 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil Uji T Parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan di peroleh nilai t hitung sebesar 3,588 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H4 di terima yang artinya bahwa variabel Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) dan Pujiwidodo (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dengan sanksi perpajakan wajib pajak harus memahami adanya sanksi perpajakan agar lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu. agar mereka tidak mendapat sanksi pajak. Wajib pajak akan menaati aturan perpajakan jika mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan merugikan. Oleh karena itu, adanya sanksi perpajakan berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi perpajakan yaitu dengan mengambil kebijakan terkait sanksi perpajakan seperti melakukan pemeriksaan rutin, meningkatkan denda nominal yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga apabila sanksi perpajakan dipahami dan di mengerti oleh Wajib Pajak yang sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya sendiri, juga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3.974 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya Penerapan *Whistleblowing System* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,534 dengan nilai signifikansi 0,595 yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya penerapan *Good Governance* di lingkungan DJP masih sia sia, sehingga adanya *Good Governance* tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,509 dengan nilai signifikansi 0,612 lebih besar dari 0,05. Artinya kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Variabel Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3.588 dengan nilai signifikansi 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya Sanksi Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Hasil R Square (R^2) sebesar 0,590, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 59% sedangkan sisanya 41% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu :

1. Keterbatasan objek dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti pengaruh variabel *whistleblowing system*, *good governance*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan *R Square* senilai 0,590 atau 59% nilainya masih relatif kecil.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian sehingga kemungkinan terjadi bias , hal ini bisa terjadi dalam pengisian kuesioner tidak benar –benar diisi oleh responden yang bersangkutan.

5.3 SARAN- SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini , untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mngembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum di teliti dalam penelitian ini, di karenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sehingga menghasilkan *R Square* yang masih relative kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat di dampingi secara langsung agar informasi yang di peroleh lebih tepat.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di harapkan dapat memberikan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik ,Havis ,*Sejarah Perekenoian Ekonomi Islam Kontemporer* , Depok: Kencana , 2017.
- Arova,Noor Linda, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Pajak Dan Perilaku Religusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus DiKPP Pratama Demak) “,2020.
- Beti ,Agustina,” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*),kejujuran Wajib pajak (*Tax honesty*), Kemauan Membayar Dari wajib Pajak (*Tax Mindedness*), Kedisiplin Wajib Pajak (*Tax diclipne*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Tax Compliance*).” *Dalam Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* ISSN : 2337-56xx.Volume :xx, Nomor :xx h.3
- Bungin ,Burhan,*Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri,2017.
- Dwiyatmoko ,Pujiwidodo,”Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.1 No.1),2016.
- Darmawan ,Deni.*Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013.
- Hermawan ,Asep,Husna Leila Yusran. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri, 2017.
- Febriani ,Mutia Tri, “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang Melkukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas ”, 2016.
- Fitria ,Dona.” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pmahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jounal Of Applie Bussiniss and Economics*. Vol.4(1),2017.
- Fadhilah, ” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur”,2018.
- Gunawan ,Robertus M. Bambang.“*GRG (Good Governance, Risk Management, And Compliance) Konsep dan Penerapannya*”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, .2016.
- Hatmawa, Aglis Andhita, Slamet Riyanto.*Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen , Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta:Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama),2020.
- <https://www.google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp> diunduh pada minggu 28 juni 2020 pukul. 15.10.

- Lydiana, Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak, “*Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeg*”. Jurnal ilmiah Vol.7.No.1 ,2018.
- Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar : Edukasi Mitra grafika,2017.
- Morissan.*Statistik Sosial*, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta:Andi, 2006.
- Muria News Com,Pati di unduh pada 22 April 2020
- Mutia Tri Febriani.2016.”*Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melkukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*” ,,,,Artikel.
- News.ddtc.co.id di unduh pada 22 April 2020
- Naniek Noviani ,Luh Putu Gita Cahyani , “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26.3
- Oesman ,Abdul Wahid.“ Mewujudkan Good Governance Direktorat Jendral Pajak Dengan Reinventing Government ”, *Jurnal EKSIS* Vol.6.No.2 , 2010.
- Oktaviani, Rachmawati Meita.“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour Theory”. *Jurnal Binis dan Ekonomi*, Vol.22.No 1,2015.
- Pahlevi ,Reza Idhar & Syska Lady Sulistyowatie.” Penerapan Good Governance, Whistleblowing System Dan Resiko sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Di Kabupaten Sleman”. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol.3,2018.
- Prakoso ,Aryo, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono, Yeni Puspita, Sandhika Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum. “Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” . *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE, UN GRI Kediri*, Vol.4. No.1,2019.
- Rohmah , Noer. *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif al- Quran Dan Hadist*. Malang,2019,
- Riyanto ,Slamet,Aglis Andhita Hatmawan.*Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Yogyakarta :DEEPUBLISH,2018.
- Rusvalita ,Erna.“*Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Paja\k (KPP) Pratama Dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung*

- Dengan Implementas Whistleblowing System sebagai Variabel Moderating” ,,,,*
Tesis,2017.
- Syariah ,Naili Ulfatus.”*Pengaruh Penerapan Whistle Blowing System, Sosialisasi Perpajakan, kesadaran wajib Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Grobogan”*, Skripsi :(IAIN Surakarta), 2017.
- Siringoringo,Whereson. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang di Kota Bekasi)”. *Jurnal Akuntansi* Vol.I, No.02, 2015.
- Sukma ,Nada Melati Sukma.” *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderisasi oleh Pelaksanaan Good Government Governance”*,2019.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2017.
- Suyantor, FI. Sigit, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan menggunakan SPSS*, Semarang : WAHANA KOMPUTER.
- Tene ,Johanes Herbert,Jullie J.Sondakh, Jesy D.I. Warongan.“Pengaruh Pemahaaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal EMBA* Vol.5 No 2,2017.
- Umar ,Husein.*Riset Bisnis Di Lengkapi Contoh Proposal Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*, Jakarta: Gramedia,2003.
- UU KU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1
- W ,Gelo ,*Metodologi penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2002.
- Wardani ,Cyntia Ayu, Sulhani .“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia”.*Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. Vol 9.No.1, 2017.
- WWW. Pajak.Go.Id
- Yusuf ,Muri.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*.Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandir,2017.
- Yusuf ,Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: KENCANA (Divisi Dari Prenadamedia) ,2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya:

Nama : Novita Ayu Fibiyanti

Nim : 1705046018

Fak./Jur./Smstr/ : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah/VIII

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja anda. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya.

- a. Apabila salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku dan tidak dapat digunakan
- b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I di tempat bekerja. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

(Novita Ayu Fibriyanti)

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Ketersediaan Bapak/ Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama Bapak/ Ibu :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki ☐ Perempuan ☐
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir : SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐
5. Jenis Pekerjaan :
☐ PNS ☐ Swasta ☐ Wirausaha ☐ Lainnya

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah baik – baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang (\checkmark) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak / Ibu dengan petunjuk sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERNYATAAN

1. Variabel X1, Penerapan Variabel *WhistleBlowing System*

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya Percaya <i>Whistleblowing System</i> telah di terapkan di KPP Pratama Pati sesuai dengan fungsinya.					
2.	Saya telah mempercayai pihak berwenang atas apa yang saya laporkan melalui <i>Whistleblowing System</i> .					
3.	Pengaduan dengan metode <i>Whistleblowing System</i> mudah diakses					
4.	Ketika ada pelanggaran saya akan melaporkannya melalui <i>Whistleblowing System</i> .					
5.	Saya mempercayai identitas saya terlindungi ketika melakukan pengaduan melalui <i>Whistleblowing System</i> .					
6.	Saya mempercayai ketika saya menjadi <i>Whistleblower</i> (Pelapor) akan di jaga kerahasiaannya pada yang bersangkutan.					
7.	Ketika saya tahu adanya penyimpangan atau ketidakwajaran dalam perpajakan saya akan melaporkannya melalui <i>Whistleblowing System</i> .					
8.	Saya tidak akan melaporkan pelanggaran tanpa bukti yang akurat melalui <i>Whistleblowing System</i> .					
9.	Saya mempercayai bahwa setiap hasil pengaduan melalui <i>Whistleblowing</i>					

System di tangani dengan melibatkan pihak penegak hukum.

10. Saya yakin Direktorat Jenderal Pajak akan menangani penipuan dengan benar terhadap apa yang telah saya laporkan melalui *Whistleblowing System*.

2. Variabel X2, Penerapan *Good Governance*

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.					
2.	Saya percaya dengan adanya <i>Good Governance</i> menjadikan pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan KPP lebih efektif					
3.	Saya percaya Pengambilan keputusan di lakukan secara objektif tanpa ada kepentingan dari pihak manapun.					
4.	<i>Good Governance</i> di ciptakan dengan cara pengeleloaan sumber daya pemerintah secara efektif.					
5.	Petugas membantu orang yang bingung / kurang paham dalam mendapatkan pelayanan.					
6.	Pemerintah selalu menanggapi keluhan masyarakat terkait program perpajakan yang dilaksanakan.					
7.	Sanksi yang adil di berikan kepada					

petugas maupun pimpinan pajak ketika melanggar peraturan.

8. Pegawai Pajak tidak membedakan gender dalam hal pembayaran pajak
9. Berbagai Informasi tentang pajak yang di akses secara mudah.
10. KPP Pratama Pati memberikan informasi yang memuaskan untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

3. Variabel X3, Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya percaya bahwa salah satu penunjang pembangunan Negara adalah dengan membayar pajak.					
2.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan pendapatan tertinggi Negara.					
3.	Saya menyadari bahwa menunda membayar pajak akan merugikan Negara.					
4.	Saya menyadari pajak merupakan iuran wajib yang di bayarkan oleh rakyat untuk kemajuan Negara.					
5.	Saya sadar hasil dari pungutan pajak akan di nikmati balik oleh wajib pajak walaupun tidak langsung .					

6. Saya sadar bahwa pajak telah ditetapkan pada Undang – Undang dan dipaksakan.
7. Kesadaran lahir dari dalam diri sendiri karena memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.
8. Saya sadar membayar pajak merupakan bentuk pengabdian terhadap Negara .

4. Variabel X4, Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan disiplin perpajakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
2.	Sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah penipuan wajib pajak.					
3.	Sanksi pajak yang berat sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak.					
4.	Sanksi administrasi bagi pelanggar aturan yang sangat ringan sebagai sarana mendidik wajib pajak.					
5.	Sanksi Pajak harus dikenakan dan dilaksanakan secara tegas bagi semua Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran.					
6.	Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar tanpa toleransi.					
7.	Sanksi Pajak diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah di					

lakukan.

8. Sanksi Pajak di terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu.
10. Beban pajak akan bertambah seiring adanya bunga.

5. Variabel Y, Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar.					
2.	Saya membayar pajak penghasilan tepat waktu.					
3.	Saya melakukan pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) berdasarkan ketentuan perundang – undangan.					
4.	Saya membayar kurang bayar pajak pendapatan yang ada sebelum di periksa.					
5.	Saya melaporkan SPT yang telah di isi dengan tepat waktu.					
6.	Saya selalu melaporkan SPT setiap tahun .					
7.	Jika ada tunggakan pajak saya bersedia memenuhi kewajiban.					
8.	Saya tidak pernah melakukan penipuan atau kejahatan pajak					

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel X1 (Whistleblowing System)

WBS (X1)										SCORE
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
4	4	5	3	5	4	4	3	3	5	40
5	5	4	4	3	3	5	5	4	4	42
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	5	4	4	3	3	5	3	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	3	3	4	2	4	5	4	4	38
3	2	5	2	3	2	3	3	5	4	32
4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	35
3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	30
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46
3	3	5	4	3	3	4	5	4	4	38
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	47
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	45
4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	44
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	38
4	3	3	5	3	4	5	1	4	4	36
4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	46
4	4	5	5	3	5	5	3	1	3	38
4	3	5	4	5	5	4	4	5	4	43
5	4	2	1	2	5	3	5	4	3	34
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
3	4	3	3	5	5	3	5	5	3	39
4	3	3	5	3	3	3	5	5	3	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	3	4	5	5	4	5	3	3	40
3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	47
4	4	4	4	1	4	3	4	5	5	38
3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	32
3	4	4	5	3	3	3	4	3	4	36

4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	45
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	42
5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	45
5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	45
4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	45
4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	45
4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	46
5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	47
5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	46
3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	40
4	4	4	5	3	5	5	5	4	5	44
4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	34
5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
5	4	4	5	4	5	4	5	5	3	44
4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	41
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	43
4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	44
5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	46
5	4	5	4	5	3	4	4	5	5	44
5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	47
4	4	4	3	4	4	4	5	2	3	37
4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	5	3	4	4	4	3	5	3	38
3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	36
4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	47
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	46
5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	47
4	4	3	2	3	4	3	4	3	4	34
4	4	4	3	5	5	3	3	4	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48

4	5	4	3	5	5	5	5	5	4	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

b. Variabel X2 (*Good Governance*)

GOOD GOVERNANCE (X2)										SCORE
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
5	5	5	4	3	4	3	4	5	5	43
4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	42
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	48
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	43
4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	44
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
3	5	5	5	3	4	5	4	5	4	43
4	4	5	4	5	4	3	4	3	4	40
5	4	2	5	3	4	5	4	5	4	41
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
4	5	2	5	4	3	5	5	5	4	42
4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	43
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	48
5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	46
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
4	4	3	3	4	5	5	4	5	5	42
4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	46
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	44
5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	44
4	4	3	4	4	3	3	5	5	4	39
4	5	3	3	4	5	5	5	5	3	42
4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
2	5	3	5	3	5	5	3	5	5	41
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
3	4	3	5	3	5	5	3	5	3	39
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43

3	3	4	3	4	5	3	3	4	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
3	4	4	4	4	4	3	5	3	4	38
3	3	3	3	3	3	4	5	3	5	35
4	5	4	4	5	5	3	5	4	4	43
5	4	4	4	3	2	4	5	4	5	40
5	3	5	3	3	5	5	5	5	2	41
1	5	3	3	4	3	5	5	3	4	36
4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	46
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	44
5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	44
5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
5	4	5	4	3	5	5	4	4	3	42
3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	40
3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	38
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	45
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
3	3	3	4	5	4	3	5	5	4	39
4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
4	5	4	4	1	5	5	5	4	5	42
5	5	4	5	3	4	5	4	5	4	44
5	5	5	4	5	5	4	5	3	4	45
4	4	4	4	3	5	3	4	3	3	37
4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	44
5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	45
3	5	3	4	4	3	5	4	5	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
3	4	5	5	5	3	5	4	5	5	44
3	3	5	3	4	4	4	4	4	4	38
4	4	5	4	4	3	5	3	4	5	41
3	5	4	5	5	5	5	5	4	4	45
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	48
2	4	4	4	4	2	4	5	2	2	33
4	4	3	4	4	3	5	5	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	3	4	5	5	4	5	45
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	3	3	4	3	5	4	4	4	38
4	4	4	4	2	5	5	3	2	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49

4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	47
5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	46
5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	46
5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	46
5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	4	3	3	2	4	5	4	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	33
5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
4	5	5	5	3	4	5	5	5	5	46
5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	46
5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	46

c. Variabel X3 (Kesadaran Wajib Pajak)

KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)								SCORE
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
5	5	5	5	5	4	4	5	38
5	4	3	4	3	5	5	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	5	5	5	5	4	37
4	4	4	4	5	4	4	4	33
5	3	4	4	4	4	5	4	33
4	4	4	5	4	4	4	5	34
4	4	4	5	4	4	3	4	32
5	2	5	3	3	4	5	4	31
5	3	4	4	3	5	3	5	32
4	3	4	4	2	5	3	3	28
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	4	5	4	5	4	5	36
4	4	4	5	4	5	4	4	34
4	5	4	4	4	4	4	4	33
5	5	4	5	5	5	5	5	39
5	4	5	4	5	5	5	5	38
5	5	4	5	5	4	4	5	37
5	5	4	5	5	4	5	4	37
4	4	5	5	4	5	5	5	37

5	5	4	5	5	5	4	5	38
5	4	4	5	4	3	5	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	4	4	4	5	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	4	4	5	4	34
5	5	5	5	5	4	3	5	37
4	5	5	3	3	5	5	5	35
3	5	4	5	3	2	5	3	30
5	5	5	5	5	5	4	5	39
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	4	5	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	5	4	2	4	3	5	3	29
4	3	4	4	4	4	4	4	31
5	5	3	5	5	3	5	5	36
5	5	3	4	4	3	5	5	34
4	4	3	4	3	3	3	3	27
5	4	5	4	5	3	5	5	36
4	3	5	4	4	3	3	2	28
3	3	3	3	3	3	5	3	26
3	5	4	5	5	4	5	3	34
4	3	5	5	3	5	4	5	34
5	4	5	4	5	4	5	5	37
5	5	4	4	5	5	5	5	38
3	4	4	5	5	5	5	4	35
3	5	5	4	5	5	4	3	34
5	4	4	5	5	5	4	5	37
5	5	4	5	5	5	4	5	38
5	4	5	4	5	5	5	4	37
3	5	2	5	5	4	5	5	34
4	5	5	5	5	4	5	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	5	5	5	39
3	4	3	3	4	4	3	4	28
5	5	4	4	4	5	5	5	37
5	5	4	5	4	3	5	5	36
4	5	4	4	5	4	5	4	35
5	5	4	4	5	4	5	5	37
4	3	3	4	5	4	5	5	33
5	4	4	5	5	5	5	5	38
5	4	5	5	5	3	4	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40

5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	5	4	5	4	4	5	5	37
4	5	4	5	5	5	5	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	5	5	5	39
5	5	4	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	5	4	5	4	38
4	3	3	3	4	4	5	4	30
5	3	4	5	2	4	4	4	31
5	4	4	4	5	4	5	4	35
5	4	5	4	5	5	5	5	38
4	4	5	4	5	5	5	5	37
5	5	5	4	5	5	5	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	4	4	5	5	37
5	5	4	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	4	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	4	3	5	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	3	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	3	5	4	4	5	5	33
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	4	3	4	4	4	4	33
5	4	4	5	5	4	4	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	40

d. Variabel X4 (Sanksi Pajak)

SANKSI PAJAK (X4)										SCORE
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	
4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	46
3	2	4	4	4	5	5	4	5	5	41
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	4	4	5	2	5	1	5	41
4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	46

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
5	5	3	4	5	4	4	5	2	3	40
3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	34
3	5	3	5	4	5	3	5	3	2	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	47
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	4	5	4	3	4	4	4	5	5	43
5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	47
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	46
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	45
5	5	2	3	5	2	5	5	5	5	42
4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	45
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
5	5	5	5	5	3	5	4	4	3	44
4	5	5	5	4	5	4	4	3	4	43
2	3	2	4	3	3	5	5	3	4	34
5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	37
5	3	3	4	5	4	4	4	3	3	38
3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	32
5	4	5	5	4	3	2	5	4	5	42
5	4	2	5	4	1	3	3	5	5	37
2	5	4	4	5	5	3	2	4	5	39
5	3	4	3	5	3	2	5	5	5	40
5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
4	3	5	5	4	3	4	5	5	5	43
3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	36
4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	45
4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	46
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47

5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47
5	4	4	5	4	3	4	5	4	4	42
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	37
5	5	5	4	5	3	5	5	4	4	45
4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	36
5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	48
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	34
5	5	5	4	5	2	5	5	5	2	43
5	4	4	3	5	3	5	4	5	4	42
5	5	5	4	5	3	5	4	3	3	42
5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	46
5	5	2	5	4	3	5	1	5	5	40
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48
5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	46
4	4	5	5	5	5	4	5	5	3	45
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	2	4	3	5	2	4	4	5	5	39
4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	44
4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	47
5	5	4	4	4	1	3	4	4	4	38
3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	34
4	4	3	3	4	4	3	3	2	4	34
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	42
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	44
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	46
5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	47
5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	39
5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	45
5	4	4	4	3	5	4	5	5	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

e. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)								SCORE
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	
5	3	4	5	5	5	4	5	36
4	5	4	3	4	5	5	5	35
5	2	5	5	5	5	5	5	37
5	5	5	3	5	5	5	5	38
4	2	5	4	3	5	4	5	32
4	4	4	5	4	4	4	4	33
4	4	5	4	4	5	4	4	34
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	4	5	4	5	4	4	4	34
5	5	4	2	5	3	4	5	33
3	3	4	3	4	3	3	3	26
5	3	5	3	5	5	3	3	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	4	5	4	5	4	5	36
5	5	4	3	5	4	3	3	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	3	5	5	5	4	5	5	37
5	5	4	5	5	5	5	4	38
4	4	5	3	4	4	5	5	34
5	5	5	4	5	5	4	5	38
5	5	5	4	5	4	5	5	38
4	4	5	5	5	5	5	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	4	4	5	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	4	4	4	5	36
3	4	3	3	4	4	3	5	29
3	5	5	5	4	4	4	5	35
4	4	4	4	5	3	4	4	32
5	5	5	3	5	5	5	5	38
5	5	4	5	3	5	5	5	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	5	4	4	4	4	4	32
4	5	3	5	5	4	4	5	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	5	4	33

3	3	5	4	3	5	3	3	29
5	4	4	5	5	5	5	5	38
5	3	4	4	4	2	5	3	30
5	2	3	5	5	5	3	3	31
3	3	4	5	4	3	5	3	30
4	5	5	4	5	4	5	3	35
5	5	5	3	3	4	4	4	33
5	5	4	5	4	5	5	4	37
5	5	4	5	5	4	5	5	38
3	4	5	5	4	5	5	4	35
5	4	5	5	5	4	5	4	37
5	4	5	5	5	4	5	4	37
5	5	4	2	4	5	4	4	33
5	5	5	4	5	5	5	4	38
4	5	5	5	5	5	4	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	3	4	5	4	33
3	3	3	3	4	4	4	4	28
5	4	5	5	4	4	4	5	36
5	5	5	5	4	5	4	4	37
4	5	4	5	5	4	5	5	37
5	5	4	5	5	5	5	5	39
3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	5	4	4	4	5	5	5	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	4	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	4	4	5	5	4	4	34
4	5	5	5	5	4	5	5	38
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	4	5	5	5	5	5	39
2	5	4	2	4	4	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	4	4	5	5	37
5	4	5	5	5	5	5	5	39
5	4	3	3	4	5	4	4	32
4	4	4	3	5	4	5	4	33
3	5	2	4	3	5	5	5	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	4	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	5	5	5	5	37
5	4	4	5	4	4	4	5	35
4	5	5	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	3	5	5	5	5	5	38
5	4	5	5	5	5	5	5	39

4	5	5	5	5	5	5	5	39
5	3	5	4	4	3	5	4	33
5	5	5	4	4	4	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	5	4	5	5	36
4	2	4	5	5	4	5	4	33
4	4	3	5	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	5	5	4	5	35
4	5	5	4	5	5	4	5	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40

Lampiran 3 hasil Output _ SPSS Uji Statistik Deskriptif

Statistics						
		WBS	Good Governance	Kesadaran WP	Sanksi	Kepatuhan WP
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		43.39	43.61	35.73	43.68	35.50
Median		45.00	44.00	37.00	45.00	36.00
Std. Deviation		5.421	4.383	3.484	4.752	3.529
Minimum		30	31	26	32	24
Maximum		50	50	40	50	40

Lampiran 4 Hasil Output – SPSS Uji Validitas

A. VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM (X1)

Correlations												
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1	
X1.1	Pearson	1	.607**	.425**	.373**	.408**	.491**	.592**	.486**	.432**	.585**	.754**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson	.607**	1	.351**	.477**	.448**	.481**	.643**	.478**	.419**	.478**	.751**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X1.3	Pearson Correlation	.425**	.351**	1	.393**	.503**	.342**	.548**	.325**	.348**	.554**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.373**	.477**	.393**	1	.319**	.359**	.546**	.319**	.333**	.497**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.001	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.408**	.448**	.503**	.319**	1	.546**	.489**	.344**	.399**	.431**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.491**	.481**	.342**	.359**	.546**	1	.488**	.382**	.365**	.467**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.592**	.643**	.548**	.546**	.489**	.488**	1	.379**	.410**	.559**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	.486**	.478**	.325**	.319**	.344**	.382**	.379**	1	.379**	.367**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.432**	.419**	.348**	.333**	.399**	.365**	.410**	.379**	1	.561**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	.585**	.478**	.554**	.497**	.431**	.467**	.559**	.367**	.561**	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.754**	.751**	.676**	.659**	.694**	.698**	.792**	.631**	.657**	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. VARIBEL *GOOD GOVERNANCE* (X2)

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2
X2.1 Pearson Correlation	1	.365**	.399**	.353**	.245*	.397**	.162	.357**	.433**	.397**	.700**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.014	.000	.107	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2 Pearson Correlation	.365**	1	.216*	.471**	.176	.281**	.241*	.399**	.316**	.340**	.615**
Sig. (2-tailed)	.000		.031	.000	.080	.005	.016	.000	.001	.001	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3 Pearson Correlation	.399**	.216*	1	.242*	.265**	.348**	.157	.220*	.144	.353**	.573**
Sig. (2-tailed)	.000	.031		.015	.008	.000	.118	.028	.152	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4 Pearson Correlation	.353**	.471**	.242*	1	.261**	.373**	.338**	.262**	.421**	.397**	.673**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.015		.009	.000	.001	.008	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5 Pearson Correlation	.245*	.176	.265**	.261**	1	.251*	-.012	.327**	.282**	.251*	.527**
Sig. (2-tailed)	.014	.080	.008	.009		.012	.907	.001	.005	.012	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6 Pearson Correlation	.397**	.281**	.348**	.373**	.251*	1	.182	.178	.296**	.281**	.615**
Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000	.012		.070	.077	.003	.005	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7 Pearson Correlation	.162	.241*	.157	.338**	-.012	.182	1	.128	.360**	.200*	.449**
Sig. (2-tailed)	.107	.016	.118	.001	.907	.070		.203	.000	.046	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

X2.8	Pearson Correlation	.357**	.399**	.220*	.262**	.327**	.178	.128	1	.311**	.228*	.552**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.028	.008	.001	.077	.203		.002	.023	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	.433**	.316**	.144	.421**	.282**	.296**	.360**	.311**	1	.355**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.152	.000	.005	.003	.000	.002		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	.397**	.340**	.353**	.397**	.251*	.281**	.200*	.228*	.355**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.012	.005	.046	.023	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.700**	.615**	.573**	.673**	.527**	.615**	.449**	.552**	.651**	.629**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.197*	.430**	.300**	.296**	.298**	.194	.449**	.626**
	Sig. (2-tailed)		.049	.000	.002	.003	.003	.054	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.197*	1	.237*	.428**	.499**	.198*	.321**	.357**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.049		.018	.000	.000	.049	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.430**	.237*	1	.271**	.307**	.377**	.143	.218*	.593**
	Sig. (2-tailed)	.000	.018		.006	.002	.000	.157	.030	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.300**	.428**	.271**	1	.358**	.270**	.121	.434**	.628**

	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.006		.000	.007	.230	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.296**	.499**	.307**	.358**	1	.324**	.363**	.410**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.002	.000		.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.298**	.198*	.377**	.270**	.324**	1	.169	.423**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.003	.049	.000	.007	.001		.093	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.194	.321**	.143	.121	.363**	.169	1	.321**	.509**
	Sig. (2-tailed)	.054	.001	.157	.230	.000	.093		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.449**	.357**	.218*	.434**	.410**	.423**	.321**	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.030	.000	.000	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.626**	.646**	.593**	.628**	.712**	.613**	.509**	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. VARIABEL SANKSI PAJAK (X4)

Correlations

	X3.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4
X3.1 Pearson Correlation	1	.377**	.338**	.236*	.416**	.003	.261**	.296**	.316**	.304**	.563**
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.018	.000	.972	.009	.003	.001	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.2 Pearson Correlation	.377**	1	.287**	.406**	.420**	.211*	.253*	.227*	.104	.141	.546**
Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.000	.035	.011	.023	.302	.162	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.3 Pearson Correlation	.338**	.287**	1	.363**	.415**	.452**	.307**	.528**	.380**	.221*	.722**

	Sig. (2-tailed)	.001	.004		.000	.000	.000	.002	.000	.000	.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.236*	.406**	.363**	1	.306**	.442**	.317**	.278**	.250*	.192	.612**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.000		.002	.000	.001	.005	.012	.056	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.416**	.420**	.415**	.306**	1	.208*	.489**	.307**	.297**	.202*	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002		.037	.000	.002	.003	.044	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.6	Pearson Correlation	.003	.211*	.452**	.442**	.208*	1	.294**	.276**	.158	.290**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.972	.035	.000	.000	.037		.003	.006	.117	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.7	Pearson Correlation	.261**	.253*	.307**	.317**	.489**	.294**	1	.309**	.468**	.172	.635**
	Sig. (2-tailed)	.009	.011	.002	.001	.000	.003		.002	.000	.088	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.8	Pearson Correlation	.296**	.227*	.528**	.278**	.307**	.276**	.309**	1	.280**	.166	.604**
	Sig. (2-tailed)	.003	.023	.000	.005	.002	.006	.002		.005	.098	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.9	Pearson Correlation	.316**	.104	.380**	.250*	.297**	.158	.468**	.280**	1	.437**	.618**
	Sig. (2-tailed)	.001	.302	.000	.012	.003	.117	.000	.005		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.10	Pearson Correlation	.304**	.141	.221*	.192	.202*	.290**	.172	.166	.437**	1	.527**
	Sig. (2-tailed)	.002	.162	.027	.056	.044	.003	.088	.098	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4	Pearson Correlation	.563**	.546**	.722**	.612**	.644**	.584**	.635**	.604**	.618**	.527**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

E. VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.263**	.317**	.285**	.412**	.327**	.325**	.283**	.634**
	Sig. (2-tailed)		.008	.001	.004	.000	.001	.001	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.263**	1	.193	.110	.230*	.341**	.360**	.496**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.008		.054	.274	.022	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.317**	.193	1	.235*	.269**	.233*	.279**	.211*	.537**
	Sig. (2-tailed)	.001	.054		.019	.007	.019	.005	.035	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.285**	.110	.235*	1	.311**	.327**	.421**	.315**	.612**
	Sig. (2-tailed)	.004	.274	.019		.002	.001	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.412**	.230*	.269**	.311**	1	.298**	.335**	.317**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000	.022	.007	.002		.003	.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.327**	.341**	.233*	.327**	.298**	1	.254*	.466**	.642**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.019	.001	.003		.011	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	.325**	.360**	.279**	.421**	.335**	.254*	1	.490**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.005	.000	.001	.011		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y8	Pearson Correlation	.283**	.496**	.211*	.315**	.317**	.466**	.490**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.035	.001	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.634**	.613**	.537**	.612**	.613**	.642**	.678**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

A. VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	10

B. VARIABEL GOOD GOVERNANCE (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.798	.802	10

C. VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.785	.783	8

D. VARIABEL SANKSI PAJAK (X4)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.804	.809	10

E. VARIBEL KEPATUHAN WP (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0

Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

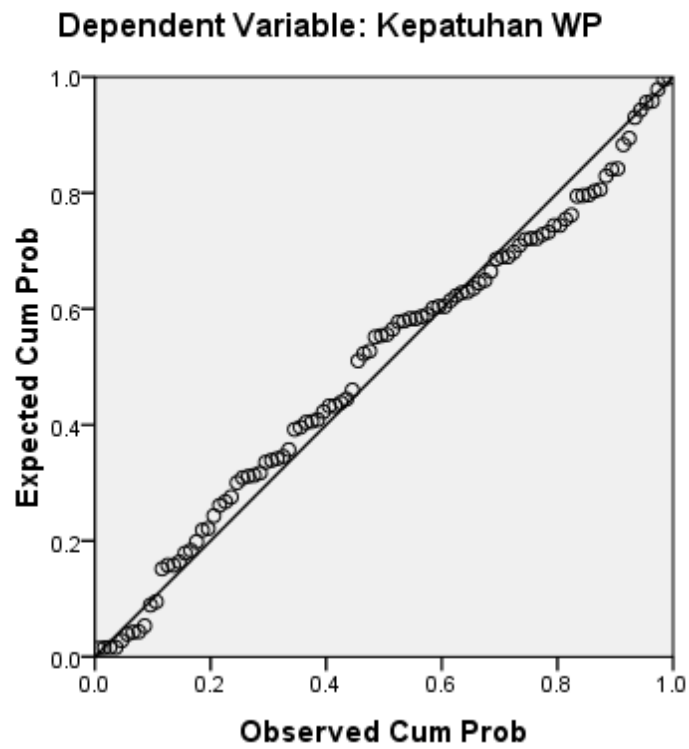
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.776	.783	8

Lampiran 0.6 Hasil Output – SPSS Uji Normalitas One – Sample KS

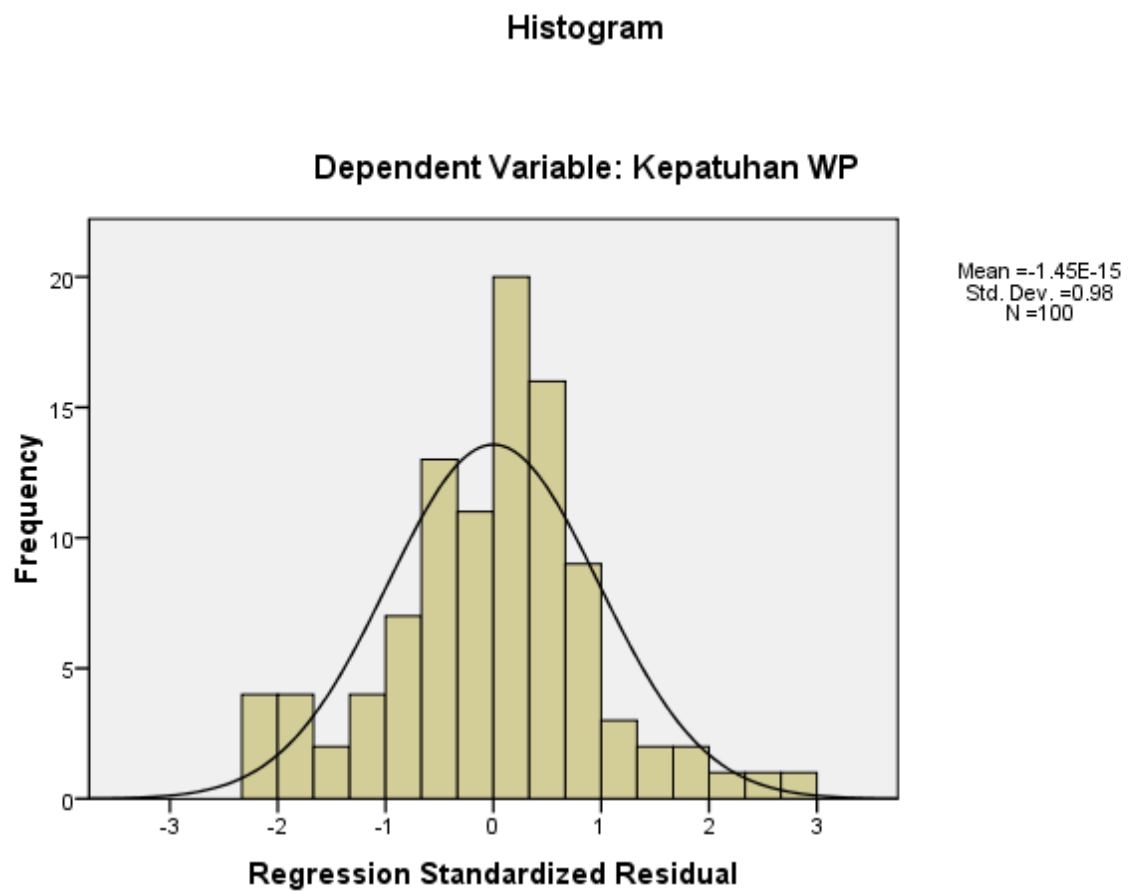
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26057172
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.069
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.666
a. Test distribution is Normal.		

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 8 Hasil Output - SPSS Normal Grafik Histogram



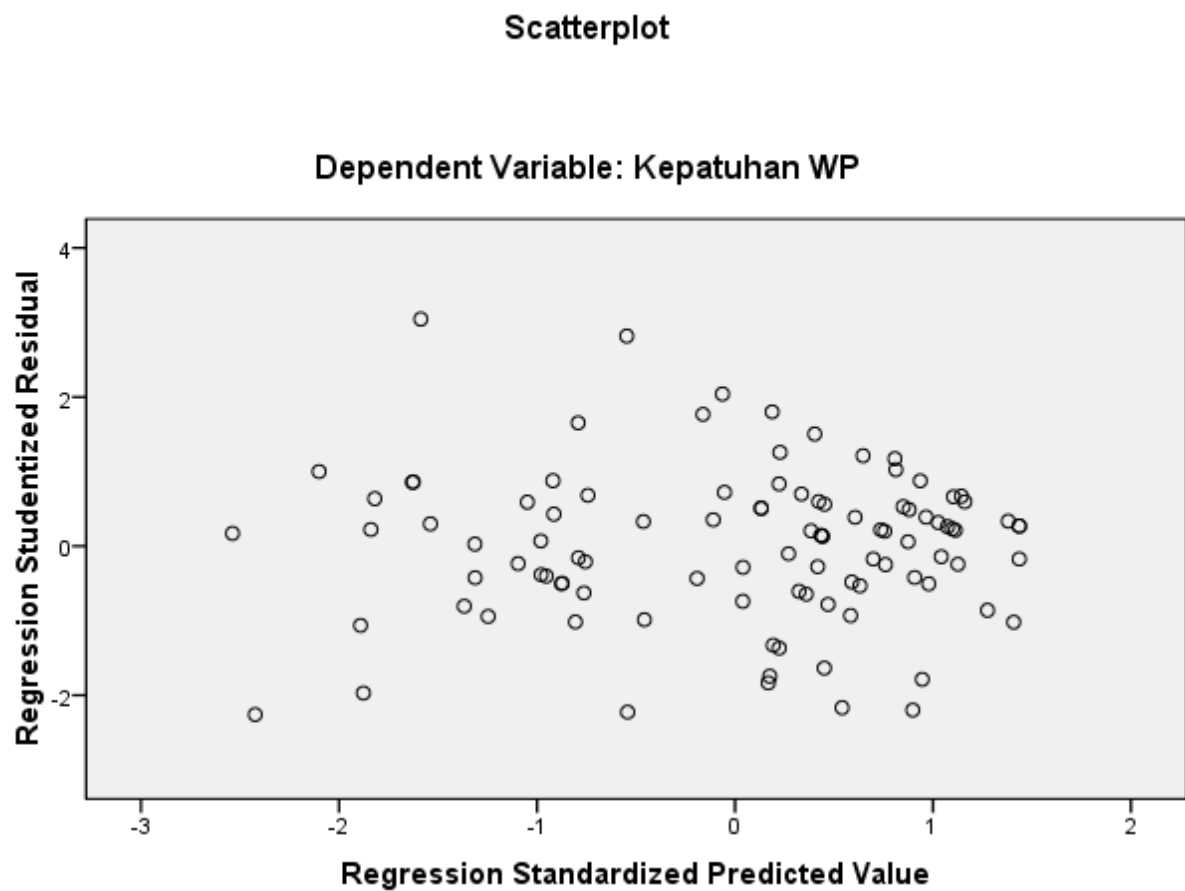
Lampiran 9 Hasil Output – SPSS Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.961	2.771		3.234	.002		
WBS	.284	.071	.436	3.974	.000	.359	2.786
Good Governance	.038	.071	.047	.534	.595	.555	1.803
Kesadaran WP	.052	.102	.051	.509	.612	.428	2.335
Sanksi	.245	.068	.330	3.588	.001	.509	1.964

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Lampiran 10 Hasil Output – SPSS Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Lampiran 11 Hasil Output – SPSS Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.188	1.726		1.847	.068
WBS	-.046	.044	-.174	-1.044	.299
Good Governance	.033	.044	.100	.750	.455
Kesadaran WP	.059	.063	.143	.939	.350
Sanksi	-.069	.043	-.227	-1.622	.108

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran12 Hasil Output – SPSS Uji Analisis Regresi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.590	.572	2.308

a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727.092	4	181.773	34.134	.000 ^a
	Residual	505.908	95	5.325		
	Total	1233.000	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi , Good Governance, Kesadaran WP, WBS

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Lampiran 13 Hasil Output – SPSS Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8.961	2.771		3.234
	WBS	.284	.071	.436	3.974
	Good Governance	.038	.071	.047	.534
	Kesadaran WP	.052	.102	.051	.509
	Sanksi	.245	.068	.330	3.588

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Lampiran 014 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HANWIL DJP JAWA TENGAH I
 JALAN MUDA BONGJAL NO. 10 SEMARANG 50132
 TELEPON 824-354915-354916-354917-354918
 FAKSIMILE 824-354915-354916-354917-354918
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (021) 5000000
 EMAIL: pengabdian@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal
 Kepada: Soga
 22 Feb 2021 07:36 Rincian

Nomor : S-
 118/RISET/WPJ.10/2021
Sifat : Biasa
Hol : Persetujuan Izin Riset

Semarang -
 22 Februari
 2021

Yth Novita Ayu Fibriyanti
 Desa Mojolawaran Rt.04 Rw. 02

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00139-2021 pada 29 Januari 2021 dengan informasi:

NIM : 1705046018
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Walisongo semarang
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Whistleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Wpop Di Kpp Pratama Pati)
Izin yang diminta : Data, Huisisioner.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **HPP Pratama Pati**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

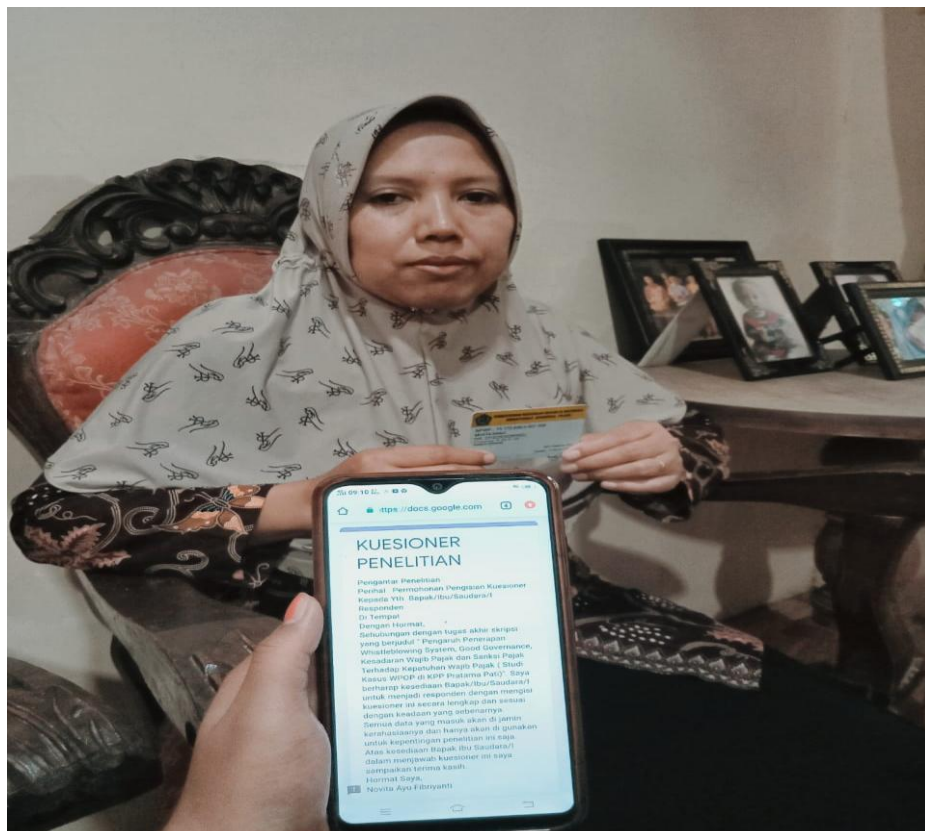
- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **22 Februari 2021 s/d 21 Agustus 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala
 Hanwil
 Kepala
 Bidang
 Penyuluhan
 Pelayanan
 dan
 Hubungan
 Masyarakat

 Ttd.

Lampiran 15 Dokumentasi






IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Ketersediaan Bapak/ Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama ~~Bapak~~/ Ibu : Siska Yuliana Hernani
2. Jenis Kelamin : ☒ Perempuan ☐ Laki-laki
3. Umur :
4. Pendidikan : S2 S3
5. Jenis Pekerjaan : Lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.632.757.000
SISKI YULIANA HERNANI
NIK : 3218116007000002
DESA KUTYONALANGAN RT 02 RW 06 HED GABUS KAS PATI
RT 002 RW 006

KPP PRATAMA PATI
Terdaftar : 9 Desember 2020

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah baik – baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak / Ibu dengan petunjuk sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Novita Ayu Fibiyanti

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 31 Desember 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Ds. Mojolawaran RT.04 RW.02, Kec. Gabus Kab. Pati

Nomor telepon/ HP : - / 085292163569

Email : novitafibriyanti@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. TK DHARMA WANITA 01 | Tahun 2004 – 2005 |
| 2. SDN Mojolawaran 01 | Tahun 2005 -2011 |
| 3. MTS Tuan Sokolangu Gabus | Tahun 2011 – 2014 |
| 4. SMA Islam Tuan Sokolangu Gabus | Tahun 2014 – 2017 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017 – 2021 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--|-------------------|
| 1. PMII Rayon Ekonomi (Bendahara Umum) | Tahun 2019 -2020 |
| 2. DEMA Fakultas Ekonomi (Anggota KEMENLU) | Tahun 2019 – 2020 |
| 3. TAX CENTER UIN Walisongo (Bendahara Umum) | Tahun 2020 – 2021 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 April 2021

Novita Ayu Fibriyanti

